

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2001**

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2001-2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 yang mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS).
- b. Bahwa berdasarkan bab I point A Umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, dimana Pemerintah Daerah menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA)
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diatur dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Kabupaten Lampung Barat, Tahun 2001-2005
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 01/DPRD/LB/KEP/2001 Tanggal 19 Pebruari 2001 tentang rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001-2005**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legeslatif Daerah.
- d. Program Pembangunan Daerah disebut Propeda adalah merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara lainnya dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun

Pasal 2

Susunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005 dituangkan dalam Program Pembangunan Tahunan Daerah (Propetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Lampung Barat 2001-2005, dituangkan dalam Program Pembangunan daerah (Propeda) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat

Disahkan di Liwa
Pada Tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT

Dto
I WAYAN DIRPHA

BAB I. UMUM

I.1 PENDAHULUAN

Kabupaten Lampung Barat dengan Ibukota Liwa terbentuk pada tahun 1991 berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tertanggal 16 Juli 1991 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1991, dengan batas :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Selatan Sunda
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten. Lampung Utara Kabupaten. Lampung Tengah dan Kabupaten. Tanggamus.

Wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki luas 4.950,40Km² atau 13,99% dari Luas Wilayah Propinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya sebagai petani. Sampai dengan akhir tahun 2000, secara administrative wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki 14 Kecamatan meliputi 169 Pekon. Keempat belas kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Pesisir Utara, Balik Bukit, Belalau, Sumberjaya, Way Tenong, Sakincau, Suoh, Batu Brak, Sukau, Bengkunt, Karya Penggawa, dan Kecamatan Lemong dengan ibukota secara berurutan adalah Biha, Krui, Pugung Tampak, Liwa, Kenali, Simpangsari, Motar Alam, Pampangan, Sumber Agung, Pekon Balak, Buay Nyerupa, Pardasuka, Kebuayan, dan Lemong (Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001).

Mencermati perkembangan yang terjadi pada lingkup Kabupaten Lampung Barat khususnya, maka kebijakan pembangunan daerah harus direvisi. Dalam upaya tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Pembangunan Daerah, yang menetapkan visi dan misi pembangunan daerah. Sebagai tindak lanjut dari RENSTRA yang lebih bersifat konseptual dan straejik tersebut, maka perlu disusun program pembangunan yang lebih operasional. Pola pembangunan

daerah harus diperbaharui dengan perubahan mendasar dan mengandung semangat desentralisasi, berpola pendekatan wilayah, serta berorientasi pada pengembangan keunggulan kompetitif daerah. Dengan demikian, diharapkan roda pembangunan dapat kembali bergulir dan krisis yang terjadi secepatnya teratasi, serta hasil pembangunan harus lebih berpihak dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Sebagai langkah kongkrit dalam perencanaan pembangunan daerah, maka disusunlah Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005. PROPEDA merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

1.2 UMUM

Pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, masih banyak masalah yang harus dihadapi dan ditanggulangi. Masalah-masalah tersebut meliputi:

1. Masih berlangsungnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Gerakan reformasi telah mendorong secara relatif terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum cukup terakomodasi dan terpenuhi.
3. Munculnya berbagai konflik sosial lebih merupakan akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang perlu segera dikoreksi dengan cepat dan tepat.
4. Di bidang hukum meskipun terjadi perkembangan terhadap produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum, namun perkembangan tersebut kurang diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

5. Upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi di bidang ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai karena:
 - (1) Pembangunan di bidang ekonomi selama ini masih dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif.
 - (2) Kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antar pelaku dan antar golongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat, yang ditandai dengan berkembangnya monopoli dan monopsoni serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat tertentu.
6. Pengangguran makin meningkat dan meluas, hak dan perlindungan tenaga kerja belum terwujud, jumlah penduduk miskin makin membengkak dan derajat kesehatan masyarakat juga menurun drastic.
7. Konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijaksanaan. Namun, di dalam pengalaman praktis selama ini, justru terjadi pengelolaan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang mengandung kelestarian alam, baik di darat maupun di laut.
8. Di bidang pendidikan masalah yang dihadapi adalah berlangsung pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Mata pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk-bentuk latihan pengamalan untuk menjadi corak kehidupan sehari-hari. Karenanya masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi dan kebersamaan, khususnya dengan menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.
9. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga belum mampu memperkuat daya saing dalam menghadapi kerjasama dan persaingan global.
10. Kehidupan beragama belum memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha esa bagi masyarakat. Merebaknya penyakit sosial, korupsi dan sejenisnya, kriminalitas, pemakaian obat terlarang, perilaku

menyimpang yang melanggar moralitas, etika dan kepatutan, memberikan gambaran terjadinya kesenjangan antara perilaku formal kehidupan keagamaan dengan perilaku dalam kehidupan keseharian.

11. Status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, yang tercermin pada sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting/strategis dalam pemerintahan, dalam badan legislative dan yudikatif, serta dalam masyarakat.
12. Penurunan peranan dan kualitas diri terjadi juga di kalangan generasi muda. Keterbatasan kreativitas, kemauan dan kemampuan mengembangkan pemikiran dan melakukan kegiatan eksploratif dan melakukan aksi sosial menjadi faktor penghambat proses kaderisasi.
13. Luasnya ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah belum didukung oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur pemerintah daerah yang memadai serta belum adanya perangkat peraturan bagi pengelolaan sumberdaya alam di daerah.

Keseluruhan gambaran tersebut menunjukkan kecenderungan menurunnya kualitas kehidupan. Berdasarkan kondisi ini semua pihak meliputi penyelenggara pemerintah, politisi, pengusaha, dan pemuka masyarakat dituntut agar bersatu dan bekerja keras melaksanakan reformasi dalam segala bidang kehidupan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Lampung Barat.

1.3 VISI

Visi pembangunan Kabupaten Lampung Barat adalah terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang madani, berakhlak mulia, dan sejahtera dengan melaksanakan pembangunan pertanian, kehutanan, dan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Masyarakat yang madani mengandung pengertian suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam suasana kebersamaan dan kerukunan antar sesama komponen masyarakat dengan tata nilai masyarakat yang dinamis, demokratis, berbudaya, agamis, sejahtera, dan berkeadilan.

Masyarakat berakhlak mulia mengandung pengertian telah terjadi penerapan nilai-nilai luhur yang bersumber pada moral keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masyarakat yang sejahtera mengandung pengertian kecukupan kebutuhan hidup dalam tatanan dan suasana masyarakat yang harmonis antar sesama komponen masyarakat.

Pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam pengertian upaya sadar kearah positif dalam mengelola sumberdaya alam secara optimal dan arif dengan mempertimbangkan kaidah kelestarian lingkungan.

1.4 MISI

Sesuai dengan visi tersebut di atas, maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Melaksanakan otonomi daerah.
2. Melaksanakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
3. Meningkatkan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
5. Melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat.
6. Meningkatkan keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan.
7. Mengembangkan kepariwisataan yang berbasis sumberdaya alam dan budaya.

1.5 KAIDAH PELAKSANAAN

Pola Dasar (POLDAS), RENSTRA, dan PROPEDA Kabupaten Lampung Barat merupakan arahan dan pedoman bagi masyarakat, swasta dan aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Barat. POLDAS merupakan dokumen induk bagi perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi dan arah kebijaksanaan pembangunan. RENSTRA memberikan landasan strategi kebijaksanaan pembangunan daerah sehingga cita-cita pembangunan Kabupaten Lampung Barat dapat terwujud. Sedangkan PROPEDA merupakan penjabaran lebih lanjut dari dokumen POLDAS dan

RENSTRA yang memuat tentang program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah:

1. POLDAS dan RENSTRA Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaannya dituangkan dalam program pembangunan daerah disusun untuk jangka waktu 5 tahun (2001-2005) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. PROPEDA disusun untuk jangka waktu 5 tahun (2001-2005) dirinci dalam rencana pembangunan tahunan daerah (REPETADA) memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan sumber-sumber pendanaannya yang ditetapkan Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Oleh karena masa jabatan Bupati Kabupaten Lampung Barat akan berakhir pada tahun 2002, maka kepada Bupati ditetapkan menyusun REPETADA untuk jangka waktu 2001-2002 dan 2001-2005

Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah mencapai cita-cita bangsa, tergantung pada peran aktif masyarakat dan *stakeholder* lainnya serta pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintah. Sehubungan dengan itu, maka semua kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mencapai visi dan misi yang ada, maka pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun POLDAS, RENSTRA, dan PROPEDA. Dalam PROPEDA diuraikan delapan agenda kebijakan yang merupakan prioritas pembangunan daerah meliputi upaya-upaya: melaksanakan otonomi daerah, melaksanakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum; meningkatkan ekonomi daerah; meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; pengelolaan sumberdaya alam; meningkatkan keberdayaan lembaga adat; dan mengembangkan kepariwisataan.

Agenda kebijakan ini kemudian lebih diuraikan lagi dalam strategi kebijakan, program-program pembangunan daerah yang bersifat prioritas disertai dengan indikator-indikator

kinerjanya secara rinci dan terukur. Penggunaan indikator kinerja ini merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program pembangunan.

Untuk dapat secara sistematis menjabarkan kedelapan agenda tersebut, maka sistematika penulisan PROPEDA adalah sebagai berikut :

- Bab pertama menjelaskan kondisi umum, visi, misi dan kaidah pelaksanaan Propeda
- Bab kedua menguraikan upaya-upaya melaksanakan otonomi daerah.
- Bab ketiga menguraikan upaya melaksanakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
- Bab keempat menguraikan upaya meningkatkan ekonomi daerah.
- Bab kelima menguraikan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- Bab keenam menguraikan upaya pengelolaan sumberdaya alam.
- Bab ketujuh menguraikan upaya meningkatkan keberdayaan lembaga adat.
- Bab kedelapan menguraikan upaya mengembangkan kepariwisataan.
- Bab kesembilan merupakan penutup.

BAB II. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah adalah pelimpahan tugas pemerintahan yang disertai dengan kewenangan untuk mengambil keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat kepada daerah dan desa. Pelaksanaan otonomi daerah selama ini dihadapkan pada berbagai kendala, baik menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun aspek-aspek teknis lainnya.

Mengantisipasi perkembangan eksternal dan internal, maka Pemerintah Indonesia sejak tahun 1999 mengubah paradigma pembangunan melalui penetapan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan paradigma ini tentunya akan berdampak pada dinamika pembangunan yang ditekankan pada pembangunan di daerah, terutama ditingkat Kabupaten atau Kota harus mempersiapkan diri untuk dapat mengantisipasi dan mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan potensi daerah

2.1 KONDISI SAAT INI

2.1.1 Masalah

Dalam upaya penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Barat masalah utama yang dihadapi meliputi:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dan aparatur pemerintah sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan dalam rangka memberikan pelayanan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- b. Belum tersedianya perangkat peraturan untuk peningkatan pendapatan daerah yang pada akhirnya berakibat pada masih rendahnya kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.
- c. Dalam rangka peningkatan peran dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih menghadapi kendala berupa ketidakselarasan antara peran dan tugas yang seharusnya dilakukan dengan kemampuan personal dan organisasi yang ada. Hal ini disebabkan

oleh kurangnya tenaga ahli yang dapat membantu tugasnya dan keterbatasan dalam memperoleh masukan maupun proses analisis dalam pengambilan keputusan didalam organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara keseluruhan dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.

2.1.2 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah:

- a. Penyiapan sumberdaya manusia yang professional dalam manajemen publik, meliputi aspek pembuatan kebijakan dan perencanaan, tata laksana dan sistem organisasi, serta pengelolaan partisipasi masyarakat.
- b. Upaya untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah baik melalui dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah, disertai dengan kesempatan untuk menggali potensi penerimaan dan mengembangkan kegiatan ekonomi daerah.
- c. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas manajemen keuangan dan ketetapan pemanfaatan dana untuk mendukung kegiatan rutin dan pelayanan masyarakat yang lebih fektif, efisien, yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- d. Guna meningkatkan peran dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bagaimana menyediakan kebutuhan tenaga ahli yang dapat diperbanyak kepada lembaga, mengembangkan sarana komunikasi dan konsultasi dengan pihak masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan legislasi, dan mengefektifkan pengawasan kepada pihak pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, sedangkan sasarannya adalah:

- (1) Terselenggaranya pembangunan Kabupaten Lampung Barat berdasarkan kekuatan daerah.
- (2) Terciptanya kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien.

2.3 STRATEGI KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dan sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi, maka strategi kebijakan yang akan ditempuh adalah:

- (1) Penguatan kelembagaan masyarakat.
- (2) Peningkatan keberdayaan masyarakat
- (3) Pelaksanaan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat
- (4) Peninjauan kembali lembaga pemerintah yang sesuai kebutuhan.

2.4 PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam rangka mengimplementasikan strategi kebijakan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat tersebut di atas disusun program-program pembangunan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu:

- (1) Pendidikan dan pelatihan pengurus kelembagaan masyarakat,
- (2) Inventarisasi lembaga-lembaga kemasyarakatan,
- (3) Pembentukan dan pembinaan lembaga masyarakat,
- (4) Sosialisasi dan diseminasi program pembangunan,
- (5) Mengikutsertakan lembaga masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan,
- (6) Pembentukan dan pengembangan forum komunikasi antar lembaga masyarakat dalam proses pembangunan.
- (7) Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik
- (8) Evaluasi lembaga pemerintahan,
- (9) Pembentukan kembali lembaga pemerintahan yang sesuai kebutuhan,
- (10) Sosialisasi dan diseminasi lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk.

BAB III. PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN SUPREMASI HUKUM

Pemerintahan yang bersih dan supremasi hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di berbagai bidang di Kabupaten Lampung Barat. Dengan menegakkan supremasi hukum diharapkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*clean government*) dapat tercipta dan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dicapai. Di zaman orde baru, kinerja pembangunan kedua bidang ini dinilai sangat rendah yang tercermin dari tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme yang relatif parah, ketidakpastian hukum serta penegakan hukum yang lemah, sehingga mempunyai andil yang besar dan merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional yang dialami Indonesia, termasuk Kabupaten Lampung Barat

Upaya mewujudkan pemerintah yang bersih dan supremasi hukum perlu segera dilakukan dengan menmpatkannya pada posisi yang tepat dan proporsional. Sepremasi hukum diartikan bahwa hukum merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara pemerintahan dan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pembangunan di bidang hukum di Kabupaten Lampung Barat penegakan hukum, penetapan produk hukum, peningkatan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pelayanan hukum kepada masyarakat secara adil dan transparan menjadi prioritas utama, termasuk penyelesaian kasus-kasus hukum seperti kasus pertanahan yang sangat

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan yang besar dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya sendiri dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta potensi dan dan keragaman daerah, bukan berarti lepas dari rambu-rambu hukum nasional yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keseluruhan upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih tersebut harus pula didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu (1) akuntabilitas (*accountability*) yang berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, (2) keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti dapat

dan mudah dimengerti masyarakat, (3) ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, (4) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

3.1 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS

3.1.1 Kondisi Saat Ini

Keberhasilan atau kegagalan pembangunan antara lain ditentukan oleh kondisi pemerintahan daerah meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia.

Selama ini lembaga Pemerintahan Daerah dalam tugasnya di bidang pemerintahan dan pembangunan belum memperlihatkan citra dan kinerja yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaantaat pada aturan hukum, dan profesional, serta prinsip *velean government* yang bebas dari penyalahgunaan kewenangan dan penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada akhirnya hal ini menimbulkan citra yang buruk dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan.

Di sisi lain, paradigma baru pembangunan melalui penetapan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN, menuntut berbagai persiapan daerah Kabupaten Lampung Barat untuk dapat mengantisipasi dan mengakomodasi berbagai tuntutan dan kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan potensi daerah. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan tersendiri karena belum mantapnya hubungan kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta masalah sumber daya manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitasnya.

Rendahnya kinerja aparatur mencerminkan belum memadainya kompetensi dan profesionalisme sebagian besar pegawai negeri sipil. Pendayagunaan aparatur pemerintah dihadapkan pada belum memadainya kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur dalam rangka pencapaian kompetensi yang dibutuhkan. Sebagai gambaran pada tahun 1998 dari 876 orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemda Kabupaten Lampung Barat, 2 orang hanya tamat SD, 24 orang tamat SLTP, 517 orang tamat SLTA, 152 orang tamat Akedemi, 154 sarjana, dan hanya 6 orang lulusan Pasca Sarjana (Lampung Barat dalam

Angka, 2000). Sedangkan kesempatan untuk mengikutipelatihan teknis fungsional sangat terbatas. Masalah lain yang terkait dengan SDM aparatur pemerintahan daerah adalah masih belum mantapnya sistem pembinaan karir, mulai dari sistem formasi, rekrutmen, promosi dan mutasi serta rendahnya gaji dan tingkat kesejahteraan.

Dalam bidang ketatalaksanaan, permasalahan yang dihadapi antara lain belum mantapnya manajemen aparatur pemerintahan baik yang bersifat administrasi umum maupun administrasi kebijaksanaan pembangunan, sehingga menimbulkan pelayanan umum yang berbelit-belit dan ekonomi biaya tinggi. Hal tersebut pada dasarnya mencerminkan kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan terhadap fungsi dan tugasnya yang esensinya adalah melayani publik. Dilain pihak kurang berfungsinya pengawasan baik eksternal maupun internal serta sering terjadinya tumpang tindih pengawasan diberbagai instansi mencerminkan belum mantapnya profesionalisme pengawasan dan masih lemahnya fungsi pengawasan.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan pemerintahan Kabupaten Lampung Barat yang bersih dan demokratis dalam lima tahun mendatang adalah:

- (1) Mewujudkan pemerintahan bersih
- (2) Menciptakan kehidupan politik yang demokratis dan dinamis

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

- (1) Terciptanya aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bersih
- (2) Terciptanya manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien.
- (3) Terwujudnya sistem politik yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (4) Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan dinamis.

3.1.3 Strategi Kebijakan

Dalam upaya untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Barat yang bersih dan demokratis, maka strategi kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- (1) Pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien.
- (3) Peningkatan peran organisasi politik didalam proses demokratis.
- (4) Peningkatan dan pengembangan proses politik yang demokratis dan dinamis.

3.1.4 Program-program Pembangunan

Program-program pembangunan dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan demokratis daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai tujuan dan saran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Pendidikan dan latihan bagi aparatur pemerintah dan dunia usaha
- (2) Studi lanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi bagi aparatur pemerintah.
- (3) Penjenjangan karir structural dan fungsional
- (4) Analisis fungsi tugas, dan jabatan,
- (5) Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan, termasuk Pekon,
- (6) Pendidikan dan pelatihan sistem politik yang demokratis dan dinamis bagi anggota DPRD, pengurus organisasi politik, dan masyarakat,
- (7) Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang proses demokrasi politik
- (8) Penyuluhan tentang pemilu yang Jurdil kepada masyarakat.
- (9) Penyediaan sarana dan prasarana Pemilu yang memadai,
- (10) Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang professional

3.2 SUPREMASI HUKUM

3.2.1 Kondisi saat ini

3.2.1.1 Masalah

Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia di hampir seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Lampung Barat mengalami degradasi dan krisis kepercayaan sehingga menimbulkan konflik vertical yaitu perlawanan terhadap ketidakadilan structural serta konflik horizontal yaitu perlawanan terhadap ketidakadilan sosial.

Salah satu sebabnya adalah hukum yang seharusnya memberi pedoman kehidupan masyarakat ternyata dirasakan tidak menjamin keadilan sosial, demokrasi politik, dan kebebasan budaya. Penyelenggara pemerintahan termasuk aparat hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum mengutamakan kepentingan rakyat karena masih banyak dijumpai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang seperti praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, aparat penegak hukum yaitu polisi dan jaksa juga dirasakan oleh masyarakat lebih memihak pada kekuasaan penguasa.

Hal ini dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip negara hukum, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum, serta merosotnya wibawa aparat penegak hukum. Keadaan ini juga menjadi pemicu timbulnya berbagai konflik di masyarakat dan menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk mencari penyelesaian dengan caranya sendiri yang tidak jarang sangat bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia, seperti tindak kekerasan, penjarahan, dan pemaksaan kehendak.

Di sisi lain, upaya mewujudkan sistem hukum yang mantap baik nasional maupun daerah masih terhambat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dan tidak mampu menampung dinamika perubahan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah harus pula disertai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, karena jika tidak akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru pembangunan daerah.

Belum membudayanya nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum juga merupakan salah satu sebab lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang diharapkan berperan untuk menanggulangi berbagai permasalahan tersebut dirasakan tidak dapat memberikan hasil yang optimal. Selain itu kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baru baik kepada masyarakat umum maupun kepada aparat pemerintahan dalam upaya

menciptakan persamaan persepsi dalam pelaksanaannya, sering kali menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dan penyelenggara pemerintahan termasuk aparat penegak hukum.

3.2.1.2 Tantangan

Tantangan utama pembangunan bidang hukum adalah menegakkan supremasi hukum melalui upaya mewujudkan sistem hukum yang mantap baik nasional maupun daerah dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dan tidak lagi mampu menampung dinamika perubahan dalam masyarakat yang semakin kompleks harus diperbaharui. Hal ini juga terkait erat dengan pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang harus pula disertai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, karena jika tidak akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru pembangunan daerah. Selain itu, belum membudayanya nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum, lemahnya kesadaran hukum, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana hukum merupakan tantangan pembangunan bidang hukum di Kabupaten Lampung Barat

3.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan di bidang hukum dalam lima tahun mendatang yaitu menegakkan supremasi hukum di daerah Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

- (1) Tertatanya sistem hukum daerah
- (2) Terwujudnya kondisi yang tertib, aman, damai, dan stabil
- (3) Terwujudnya aparatur penegak hukum yang profesional.

3.2.3 Strategi Kebijakan

Supremasi hukum yang harus diberikan tempat yang strategis sebagai instrumen yang akan mengarahkan, menjaga, dan mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi kebijakan yang ditetapkan meliputi:

- (1) Penyempurnaan dan pengembangan materi hukum
- (2) Menata kelembagaan hukum di daerah
- (3) Peningkatan budaya KADARKUM
- (4) Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan
- (5) Mendukung pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum

3.2.4 Program-program Pembangunan

Program-program pembangunan di bidang hukum terutama difokuskan untuk mendukung proses penegakan supremasi hukum yang sesuai dengan spirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Barat baik dalam lingkup nasional maupun daerah, yaitu :

- (1) Inventarisasi, evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan di daerah
- (2) Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di daerah
- (3) Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan di daerah
- (4) Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Penyuluhan KADARKUM
- (6) Penerapan sistem pengawasan aparaturnegak hukum
- (7) Mendukung penyediaan sasaran dan prasarana penegak hukum
- (8) Peningkatan operasi yustisi dan bantuan hukum kepada masyarakat
- (9) Penyidikan dan latihan bagi aparaturnegak hukum dan penyidik PNS di daerah

BAB IV. PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN

4.1 KONDISI SAAT INI

4.1.1 Masalah

Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 1999 masih didominasi oleh sektor pertanian, walaupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami penurunan dari 72,41% tahun 1998 menjadi 70,97% pada tahun 1999 (Tabel 1). Hal ini menandakan bahwa perekonomian Kabupaten Lampung Barat sangat tergantung kepada sektor pertanian. Di lain pihak, pengembangan sektor pertanian dihadapkan pada berbagai kendala antara lain tergantung pada alam, produk yang dihasilkan mudah rusak dan *bulky*, harga produk berfluktuasi, teknologi yang digunakan masih tradisional dan sebagainya.

Secara makro pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu tahun 1994-1999 berfluktuasi (Tabel 2). Laju pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 1995, yaitu sebesar 11,09%. Namun dua tahun kemudian (tahun 1997), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat sangat memprihatinkan karena mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -1,42%. Pada tahun 1998 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,20% dan meningkat menjadi 6,00% pada tahun 1999.

Tabel 1 Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1998-1999

No.	Lapangan Usaha	Tahun 1998		Tahun 1999	
		(juta rupiah)	%	(juta rupiah)	%
1.	Pertanian	582.895	72.41	777.007	70.97
2.	Pertambangan dan penggalian	8.000	0.99	8.692	0.79
3.	Industri pengolahan tanpa migas	24.973	3.10	26.353	2.41
4.	Listrik dan air bersih	1.241	0.15	1.480	0.14
5.	Bangunan	26.918	3.34	29.410	2.69
6.	Perdagangan, hotel, restoran	97.894	12.16	173.220	15.82
7.	Pengangkutan dan komunikasi	12.573	1.56	17.537	1.59
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	14.595	1.81	14.987	1.39
9.	Jasa-jasa	35.937	4.46	46.324	4.23
Produk Domestik Regional Brutto		805.026	100.00	1.094.830	100.00

Sumber: PDRB Kabupaten Lampung Barat, 2000

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat pada tahun 1998 terutama disebabkan oleh peningkatan produksi pertanian terutama subsektor tanaman perkebunan yang meningkat sebesar 104,79%. Fakta ini memperjelas arah perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan agar dapat berhasil secara optimal.

Tabel 2 juga menunjukkan tiga kondisi pertumbuhan ekonomi, yaitu kondisi sebelum terjadi resesi ekonomi (sebelum tahun 1997) dengan laju pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, kondisi resesi ekonomi (tahun 1997) dengan laju pertumbuhan ekonomi negatif, dan kondisi pemulihan dari krisis ekonomi (setelah tahun 1997) dengan laju pertumbuhan ekonomi cukup tinggi

Tabel 2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 1994-1999

Sumber PDRB Kabupaten Lampung Barat, 2000

Dengan menyimak ketiga kondisi tersebut di atas, maka untuk keperluan perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Barat dapat diprediksi laju pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu lima tahun mendatang. Terdapat tiga scenario yang dapat digunakan, yaitu scenario optimis (berdasarkan kondisi ekonomi sebelum krisis), scenario pesimis (berdasarkan kondisi ekonomi saat terjadi krisis), dan scenario moderat (berdasarkan kondisi ekonomi dua tahun terakhir). Berdasarkan hasil analisa, maka rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat per tahun selama kurun waktu lima tahun mendatang diperkirakan sebesar 4,00% (scenario pesimis), 6,00% (scenario moderat), dan 9,00% (scenario optimis).

Struktur PDRB Kabupaten Lampung Barat (Tabel 1) menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki kontribusi yang terbesar dalam PDRB Kabupaten Lampung Barat dan struktur ekspor pun masih di dominasi oleh produk non migas. Oleh karena itu pengembangan sektor pertanian sangat diperlukan. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi cukup berat seperti merosotnya harga produk pertanian terutama beras, kopi dan tanaman pangan lain, tyerlebih ditingkat petani, karena lemahnya perencanaan usaha tani dan lemahnya koordinasi antara subsistem sarana produksi usaha tani, subsistem agroindustri, dan pemasaran. Hal ini mengakibatkan tingginya biaya transaksi antar partisipan dalam sistem agribisnis sehingga produksi dan harga antar waktu tidak optimal.

Lemahnya kelembagaan kelompok tani dan koperasi dalam proses transaksi dengan pelaku ekonomi lainnya serta lemahnya derajat transparansi serta komitmen pengusaha dalam membantu upaya petani dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya telah melemahkan usaha-usaha kemitraan antara petani dan pengusaha. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan lemahnya koordinasi antara dinas/instansi terkait dalam upaya pengembangan agrobisnis.

Keberadaan pengusaha kecil dan menengah yang berjiwa koperasi sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi kerakyatan, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan PKMK ini adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Keterbatasan akses terhadap informasi teknologi, modal, dan pasar, serta terbatasnya jumlah lembaga penyedia jasa yang melayani PKMK. Sementara itu, masalah mendesak yang terkait dengan krisis adalah semakin langkanya sumber dana pinjaman untuk mendukung biaya operasional produksi.

Masalah lainnya adalah masih ditemukannya regulasi dan retribusi yang dasar hukumnya kurang kuat; dan proses perizinan yang kurang transparan. Kendala lainnya adalah lemahnya koordinasi antar badan lembaga yang mengembangkan program pembinaan PKMK.

Perubahan cepat sebagai dampak globalisasi menuntut masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk semakin mempercepat kesejajaran dan kesetaraan dengan daerah lain. Peran IPTEK yang lebih besar dalam meningkatkan produktivitas bahkan semakin dituntut sebagai salah satu upaya pemulihan dari krisis. Dengan demikian tiada pilihan lain bagi Kabupaten Lampung Barat untuk lebih meningkatkan penciptaan berbagai produk IPTEK dan meningkatkan kemampuan adopsi ke dalam proses produksi.

Pemanfaatan sumberdaya alam telah berperan sebagai salah satu pilar perekonomian Kabupaten Lampung Barat. Meskipun demikian nilai tambahnya masih harus ditingkatkan. Untuk itu, peningkatan nilai tambah dari berbagai sumber daya alam tersebut dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan tingkat kemampuan modal, tenaga kerja, dan peluang pasar baik lokal, regional maupun internasional merupakan tantangan pembangunan IPTEK berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan landasan pembangunan Lampung Barat yang berkelanjutan dan kokoh, maka penguatan intuisi pasar sangat diperlukan agar mekanisme pasar berjalan semakin baik. Berkaitan dengan ketenagakerjaan, permasalahan utama adalah belum tersedianya sarana yang memfasilitasi terjadinya permintaan dan penawaran tenaga kerja yang efektif.

4.1.2 Tantangan

Sektor pertanian memberikan kontribusi besar dalam PDRB Lampung Barat, yaitu 72,41% tahun 1998 dan 70,97% tahun 1999 (PDRB Lampung Barat, 2000). Hal ini berarti bahwa sektor pertanian memiliki peranan yang dominan dalam membentuk PDRB Kabupaten Lampung Barat. Oleh karena itu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat sebaiknya dititikberatkan kepada pembangunan pertanian dan pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian (agroindustri).

Keberhasilan pembangunan pertanian akan berdampak positif terhadap stabilitas pangan, menekan laju inflasi, meningkatkan lapangan kerja dan menjamin stabilitas ekonomi yang pada akhirnya akan berguna bagi pengamanan proses pemulihan ekonomi dan memperkuat

landasan bagi pembangunan jangka panjang tahap selanjutnya. Adapun tantangan yang dihadapi adalah semakin dekatnya era perdagangan bebas ASEAN, kawasan Asia Pasifik (APEC) pada tahun 2003, dan WTO pada tahun 2010 menuntut peningkatan daya saing produk termasuk produk-produk pertanian.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin tinggi jumlah permintaan akan kebutuhan bahan pangan di pasar domestik. Selain itu, peningkatan permintaan daging akan mendorong semakin berkembangnya industri peternakan dan perikanan yang tentunya akan diikuti dengan perkembangan industri pakan ternak dan ikan. Kondisi ini menuntut semakin tersedianya produk pertanian sebagai bahan baku pakan ternak/ikan yang berarti upaya peningkatan produksi pertanian sangat dibutuhkan.

Kondisi geografis dan sebaran penduduk yang tidak merata di wilayah Lampung Barat menimbulkan tantangan dalam penyediaan jasa pelayanan prasarana pada daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan. Adapun tantangan yang dihadapi adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, melepaskan diri dari keterbatasan pendanaan, dan memperbaiki sektor swasta dalam rangka meningkatkan peran swasta dan masyarakat di bidang prasarana.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai amanat GBHN 1999, tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat di bidang ekonomi selama 2001-2005 adalah:

- (1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat
- (2) Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan kemitraan.
- (3) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

Adapun sasarannya adalah:

- (1) Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4% per tahun
- (2) Tercapainya pendapatan perkapita sebesar Rp. 2.091.036 per tahun
- (3) Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis agrobisnis berorientasi pasar dan kemitraan
- (4) Terwujudnya kesiapan pelaku ekonomi dalam menghadapi era globalisasi
- (5) Terwujudnya keuangan daerah yang mampu membiayai pembangunan daerah

4.3 STRATEGI KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Barat dan dengan memperhatikan keragaman serta potensi ekonomi yang dimiliki, maka ditetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- (1) Peningkatan laju investasi.
- (2) Intensifikasi, ekstensifikasi, eksplorasi, dan rehabilitasi kegiatan ekonomi.
- (3) Pengembangan UMR/UMP.
- (4) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya tenaga kerja.
- (5) Pengembangan agribisnis.
- (6) Pengembangan pasar dan sistem informasi agribisnis.
- (7) Pengembangan kemitraan agribisnis.
- (8) Pengembangan kewirausahaan.
- (9) Pengelolaan keuangan daerah
- (10) Pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

4.4 PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

- (1) Promosi dan pengembangan investasi
- (2) Menciptakan dan mengembangkan kerjasama investasi dengan pihak luar
- (3) Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi
- (4) Penyuluhan kegiatan ekonomi kepada masyarakat
- (5) Pengembangan cabang-cabang kegiatan ekonomi potensial
- (6) Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi
- (7) Memfasilitasi kredit mudah dan murah
- (8) Evaluasi dan peningkatan UMR/UMP
- (9) Pendidikan dan latihan peningkatan keterampilan tenaga kerja

- (10) Perancangan sistem agribisnis potensial (Pertanian yanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan/kelautan)
- (11) Penetapan kawasan senttra agribisnis
- (12) Perluasan investasi agribisnis
- (13) Penyusunan sistem informasi pasar
- (14) Mengadakan forum konsultasi agribisnis
- (15) Pembentukan pasar agribisnis
- (16) Perluasan jaringan pemasaran produk agroindustri
- (17) Memfasilitasi kemitraan agribisnis
- (18) Peningkatan kualitas kewirausahaan bagi pengusaha kecil dan mengngah
- (19) Pembentukan inkubator bisnis
- (20) Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah
- (21) Perencanaan penggalian sumber-sumber PAD
- (22) Optimalisasi Sumber-sumber PAD
- (23) Pengembangan dan pemberdayaan BUMD

BAB V. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Pembangunan sumberdaya manusia (SDM) merupakan bagian tak terpisahkan dalam pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatifitas, disiplin, profesionalisme, serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berwawasan lingkungan maupun kemampuan manajemen.

Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika, maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan dapat terlaksana antara lain melalui pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, agama, budaya, serta pemberdayaan masyarakat.

5.1 KONDISI SAAT INI

5.1.1 Masalah

Pendidikan

Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia dewasa ini sedang menghadapi sejumlah masalah yang sangat besar terutama selama dua tahun terakhir ini dan dalam era yang berdimensi global. Dalam global ini kompetisi antar bangsa makin ketat dalam berbagai bidang kehidupan, serta meningkatnya standar kompetensi untuk bekerja di berbagai sektor. Agar mampu berkompetisi dalam tatanan kehidupan global, dibutuhkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan kompeten. Untuk itu peran pendidikan sangat menentukan kemampuan daerah untuk bersaing.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat dapat dirangkum menjadi tiga tema utama, yaitu pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, dan manajemen sistem pendidikan.

(1) Pemerataan Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga oleh pihak swasta, terbukti dari banyaknya jumlah sekolah swasta mulai dari tingkat pra sekolah (TK) sampai sekolah menengah umum (SMU). Pada tahun 2000 tercatat sebanyak 342 unit sekolah mulai dari tingkat TK sampai SMU, yang terdiri dari 30 unit TK, 259 unit SD, 39 unit SMP/ sederajat, dan 14 unit SMA/ sederajat (Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001). Dari jumlah fasilitas pendidikan tersebut, sebanyak 14% diantaranya diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Jumlah siswa sekolah dasar pada tahun 1999/2000 mencapai 49.988 siswa. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 1998/1999 yang mencapai 49.532 siswa (Lampung Barat Dalam Angka, 2000).

Walaupun angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar pada tahun 2000 cukup tinggi (94,14%), namun demikian masih ada anak-anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang tidak berada pada sistem persekolahan, karena tidak mendaftar sekolah dan atau putus sekolah. Tercatat sebanyak 3.191 orang (5,86%) anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah (Monografi Kabupaten Lampung Barat 2001). Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk miskin yang bermukim di desa tertinggal dan berdampak pada terbatasnya kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan. Selain itu, terbatasnya sarana perhubungan terutama di desa-desa terpencil merupakan kendala bagi penduduk untuk menjangkau layanan pendidikan. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, namun hal ini tidak dapat diabaikan untuk mendapat layanan pendidikan.

Keberhasilan pemerataan pendidikan pada jenjang sekolah dasar berdampak pada meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pada tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 77,48% pada tahun 1998 menjadi 80,65% pada tahun 2000 (Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001). Keberhasilan ini sebagai akibat dari pencanangan program Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun yang dicanangkan pada awal Pelita VI. Melalui program tersebut antara lain dilaksanakan pembangunan unit gedung baru SLTP-MTs secara intensif disertai oleh pengadaan sarana dan prasarana serta penyediaan tenaga pendidikan.

Namun demikian, keberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun tersebut sejak tahun 1997 terancam oleh krisis ekonomi, sehingga perlu disediakan beasiswa bagi siswa SLTP-MTs berprestasi terutama dari keluarga miskin. Upaya ini dilakukan agar siswa dari keluarga miskin tetap bertahan disekolah serta menarik kembali siswa yang terpaksa putus sekolah akibat krisis ekonomi.

(2) Kualitas Pendidikan

Pembangunan pendidikan selain diupayakan untuk mempertahankan angka partisipasi kasar pada setiap jenjang pendidikan, juga tetap memperhatikan upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Tidak seperti pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan selama ini masih belum menunjukkan hasil yang nyata. Salah satu indikator mutu pada tingkat SD adalah kemampuan berhitung, membaca dan penalaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Barat masih rendah. Rendahnya kualitas pendidikan ini disebabkan antara lain oleh kompetensi dan distribusi yang masih belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, serta kurikulum yang kurang sesuai.

Guru merupakan komponen vital yang menjamin mutu pendidikan pada jenjang SD-MI. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan maka tuntutan kompetensi untuk menjadi seorang guru SD-MI pun mengalami penyesuaian, untuk itu persyaratan untuk menjadi seorang guru SD_MI sekurang-kurangnya harus memiliki kualifikasi D-II.

Upaya meningkatkan kualitas guru telah dimulai yakni melalui program penyetaraan D-II. Juga ada program sertifikasi guru kelas untuk guru Madrasah Ibtidaiyah negeri dan swasta yang sudah mengikuti D-II agama tetapi bukan guru kelas, sehingga guru tersebut mempunyai kualifikasi sebagai guru D-II agama tetapi juga disertifikasikan lagi kemampuannya sebagai guru kelas.

Rendahnya mutu guru dan tenaga kependidikan antara lain disebabkan oleh kurangnya minat lulusan SLTA, terutama yang berprestasi tinggi, untuk memilih bidang kependidikan keguruan. Profesi guru tidak menarik karena belum adanya sistem penghargaan/penggajian tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kemampuan, profesionalisme dan pengabdian. Selain itu sistem pembinaan karier bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya juga belum mantap.

Faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya kualitas kependidikan adalah karena distribusi guru yang tidak merata, baik antar daerah maupun antar bidang studi. Pada jenjang SD pada umumnya ada kelebihan guru di perkotaan sedangkan di pedesaan terjadi kekurangan guru.

Faktor lain yang juga sangat penting dalam menentukan mutu pendidikan adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang mutu pendidikan antara lain jumlah dan kualitas gedung sekolah serta buku pelajaran pokok. Kabupaten Lampung Barat hingga tahun 1999/2000 terdapat 313 buah gedung sekolah mulai dari TK sampai dengan SLTA, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Namun jika dilihat dari kualitasnya masih banyak sekolah berada dalam kondisi rusak dari kategori rusak ringan sampai dengan berat yang harus segera diganti atau dibenahi secara cepat. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi fisik sekolah-sekolah SD/MI di Kabupaten Lampung Barat baik dari segi gedung maupun peralatannya sangat memprihatinkan.

Sarana dan prasarana lain yang kurang memadai adalah kurang tersedianya buku pelajaran pokok. Ratio satu paket buku untuk satu orang siswa sekolah dasar Kabupaten Lampung Barat pada tahun 1999/2000 masih jauh dari harapan. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh data jumlah murid yang tidak sesuai serta distribusi yang sulit sehingga buku tidak sampai di sekolah akibat prasarana transportasi yang belum memadai.

Untuk menyelamatkan mutu proses belajar mengajar, terutama akibat krisis ekonomi dan moneter, Pemerintah telah memberi Dana Bantuan Operasional (DBO) pendidikan kepada semua sekolah dari tingkat SD hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Selain itu, upaya pemberian DBO juga ditujukan untuk menghindari sekolah menarik lebih banyak sumbangan dari orang tua siswa yang dapat berdampak pada menurunnya minat untuk melanjutkan studi.

Masalah lain yang dihadapi pada jenjang pendidikan menengah adalah jumlah dan jenis lulusan pendidikan kejuaruan di tingkat menengah belum sepenuhnya sepadan dengan kebutuhan tenaga trampil dalam berbagai bidang pembangunan. Selain itu, sistem dan proses belajar mengajar pada jenjang SLTA masih belum mampu menghasilkan lulusan yang cukup berkualitas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

(3) Manajemen Sistem Pendidikan

Pola pembangunan pendidikan pada masa lalu mengakibatkan adanya dualisme manajemen sistem pendidikan khususnya pendidikan dasar, dimana di satu pihak pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap fisik sekolah sedangkan kualitas pendidikan menjadikannya tanggung jawab lembaga sektoral. Adanya dualisme tersebut membuat sekolah tidak dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Kondisi demikian menyebabkan sekolah menjadi sangat tergantung kepada kedua lembaga tersebut yang kadang-kadang dalam pelaksanaannya sangat menyulitkan.

Dalam rangka desentralisasi pendidikan yang akan diterapkan nantinya berbasis di Kabupaten/kota, maka peran Dinas Pendidikan mulai ditingkatkan dan pelaksanaan program-program pendidikan mulai dipadukan dengan melibatkan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sektoral (Dinas Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Agama). Lembaga tersebut secara bersama-sama menyusun perencanaan program dan melaksanakannya secara terpadu. Keterpaduan ini ditandai dengan petugas pengelola kegiatan tersebut diambil dari ketiga instansi tersebut. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemetaan sekolah, penambahan akses, pelatihan guru dan pengembangan staf di masing-masing instansi tersebut.

Mengingat sekolah merupakan unit pelaksana pendidikan formal yang terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini akan tercapai jika sekolah diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya.

Pemuda dan Olah Raga

Kualitas suatu bangsa ke depan sangat ditentukan oleh kualitas pemuda pada hari ini. Oleh karena itu pembangunan di bidang pemuda sangat perlu mendapat respon yang signifikan dari kita bersama.

Pembinaan dan pengembangan pemuda selama ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemuda serta kemampuannya untuk memantapkan, mengembangkan, dan menguasai iptek, meningkatkan partisipasi pemuda dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial, serta kepedulian pada lingkungan sosial dan lingkungan hidup; meningkatkan kualitas pemuda sebagai pewaris nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan meningkatkan kualitas kepemimpinan pemuda sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dirumuskan berbagai kebijakan antara lain adalah meningkatkan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan; meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial politik, ekonomi, sbudayaan serta pertahanan keamanan; meningkatkan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan sosial politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan; meningkatkan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan dan meningkatkan kemandirian dalam berorganisasi.

Dari berbagai kebijakan yang telah digariskan tersebut nampak bahwa kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan melalui lembaga formal maupun non formal semakin meningkat, tercermin dari semakin meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) di tingkat SLTA dan perguruan tinggi dari 42,19% tahun 1998 menjadi 52,70% tahun 2000; meningkatnya peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan ditandai dengan meningkatnya peranserta pemuda dalam program kesehatan dan keluarga berencana (KB), meningkatnya kesadaran dan pemahaman pemuda dalam politik; meningkatnya jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perkoperasian dan usaha kecil.

Bidang olah raga di Kabupaten Lampung Barat masih dirasakan kurang memperoleh perhatian yang lebih serius, yang tercermin dari masih rendahnya kualitas sumber daya manusia berprestasi di bidang olah raga yang berasal dari Kabupaten Lampung Barat pada event-event daerah maupun nasional.

Kesehatan

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakandi Kabupaten Lampung Barat sampai dewasa ini, cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Hal ini dapat diamati dari terjadinya perbaikan beberapa indikator derajat kesehatan antara lain menurunnya angka kematian bayi (AKB) dari 115 per 1000 kelahiran pada tahun 1998 menjadi 32 pada tahun 2000, angka kematian ibu (AKI) yang pada tahun 2000 hanya

mencapai 6 per 1000 kelahiran, meningkatnya status gizi, dan menurunnya angka kesakitan bagi penyakit menular.

Kabupaten Lampung Barat telah memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang hampir merata di seluruh wilayah kecamatannya. Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada tahun 1998 telah tersedia 1 unit rumah sakit umum, 2 unit rumah bersalin, 9 buah puskesmas perawatan, 8 buah puskesmas induk, 57 buah puskesmas pembantu, dan beberapa apotik (Lampung Barat dalam Angka, 2000). Beberapa masalah yang dijumpai dalam pelayanan kesehatan dasar antara lain rendahnya tingkat utilitas dan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, khususnya didaerah pedesaan.

Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor penting. Pada tahun 1998 telah tersedia sebanyak 471 orang tenaga medis dan non medis yang bekerja diberbagai tempat pelayanan kesehatan (Lampung Barat Dalam Angka, 2000). Beberapa masalah yang berkaitan dengan tenaga kesehatan ini antara lain jumlah dan penyebaran tenaga medis yang belum merata serta perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan masih terbatas pada instansi pemerintah.

Dalam hal pembiayaan, peranan sektor swasta dan masyarakat merupakan porsi terbesar pembiayaan kesehatan melalui cara pembayaran untuk tiap pelayanan (*free for service*) dibandingkan dengan melalui program asuransi.

Kependudukan dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat pada tahun 1998 sebesar 394.081 jiwa yang terdiri dari 205.264 jiwa laki-laki dan 188.817 jiwa perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,26% per tahun (Lampung Barat Dalam Angka, 2000).

Pembangunan di berbagai bidang yang dilaksanakan selama ini telah mampu meningkatkan kualitas, mengendalikan kuantitas, dan meningkatkan dinamika mobilitas penduduk. Peningkatan kualitas penduduk yang dicapai dicerminkan dari meningkatnya berbagai indikator dalam kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, agama, moral dan budaya, kesejahteraan sosial, kuantitas penduduk dapat ditunjukkan oleh indikator yang menggambarkan keadaan jumlah, struktur, kepadatan, dan terarahnya mobilitas dapat diketahui melalui pola persebaran penduduk. Namun demikian, dibalik keberhasilan yang dicapai, data dan informasi kependudukan khususnya registrasi vital sampai saat ini masih belum bisa diselenggarakan..

Dalam pelaksanaan pembangunan, masih banyak ditemukan ketimpangan-ketimpangan yang mencerminkan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Ketimpangan-ketimpangan ini telah diidentifikasi umumnya dalam bentuk akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan.

Pelaksanaan program keluarga berencana (KB) telah memberikan kontribusi bagi terwujudnya keluarga yang lebih sejahtera dan terkendalinya pertumbuhan penduduk. Namun secara umum kinerja program keluarga berencana masih belum optimal karena sangat dipengaruhi oleh faktor penawaran dan permintaan KB. Di sisi penawaran, proses pergeseran program KB yang belum tuntas dari pendekatan target demografi menuju ke arah pendekatan pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi merupakan penyebab utama ketidak-optimalan kinerja program KB. Di sisi permintaan, aspek pemahaman masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, keluarga serta remaja mengenai hak dan kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana yang relatif masih belum tinggi dan belum merata merupakan salah satu faktor yang membuat kinerja program KB belum optimal.

Pemberdayaan Perempuan

Pada tahun 1998 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat telah mencapai 394.084 orang, dan hampir setengahnya (47,9%) atau sebanyak 188.817 orang adalah perempuan (Lampung Barat Dalam Angka, 2000). Jumlah penduduk perempuan yang besar ini apabila berkualitas dan dikelola dengan efektif dan efisien, merupakan asset daerah yang besar dan sumberdaya pembangunan yang potensial. Di lain pihak, jika jumlah penduduk perempuan yang besar tidak dimanfaatkan seoptimal mungkin akan menimbulkan pemborosan dalam pembangunan. Untuk itu, optimalisasi penduduk sebagai sumberdaya pembangunan harus diimbangi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup baik laki-laki maupun perempuan agar dapat berperan dalam pembangunan, dan sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan pilihan atas peran mereka dalam pembangunan, tanpa melanggar kodrat perempuan, yaitu fungsi-fungsi reproduksinya.

Meskipun berbagai upaya pembangunan telah banyak dilakukan, namun masih dijumpai berbagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dalam hal peluang dan akses terhadap sumberdaya pembangunan, kontrolnya atas pembangunan, serta perolehan manfaatnya atas hasil-hasil pembangunan. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan antara lain ditunjukkan oleh lebih tingginya tingkat buta huruf perempuan

dan relatif rendahnya angka partisipasi perempuan dalam setiap jenjang pendidikan disbanding laki-laki. Proses pengelolaan pendidikan juga masih bias gender, dimana para peentu kebijakan sebagian besar dipegang oleh laki-laki, sehingga makin menjadikan perempuan dalam posisi yang ter subordinasikan dan pada akhirnya kurang mampu mempengaruhi kebijakan publik. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender masih banyak terjadi di berbagai bidang pembangunan lainnya seperti di bidang ekonomi, hukum, kehidupan politik, dan hak asasi manusia (HAM).

Agama

Pendidikan agama merupakan suatu hal yang sangat esensial dan fundamental, karena mengemban dua misi utama, yaitu (1) menyiapkan kerangka landasan bagi pembinaan akhlak mulia, dan (2) menyiapkan SDM berkualitas. Pendidikan agama merupakan wahana strategis bagi upaya membangun SDM bermutu, yang dijiwai oleh moralitas agama sehingga dapat melahirkan insan-insan terpelajar yang berkompeten, profesional, terampil, dan berakhlak mulia. Pendidikan agama dilaksanakan baik di sekolah-sekolah umum seperti SD, SLTP, SMU/SMK maupun disekolah-sekolah yang bercirikan agama seperti MI, MTs, dan MA.

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional mempunyai peranan yang sangat penting, utamanya dalam memberikan pendidikan agama dan keagamaan.

Jumlah madrasah di Kabupaten Lampung Barat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan agama. Data terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 1998 jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 6 buah yang terdiri atas MA Negeri 2 buah, dan MA Swasta 4 buah (Lampung Barat Dalam Angka, 2000).

Masalah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan agama di Kabupaten Lampung Barat saat ini adalah:

- a. Selama ini pembiayaan pendidikan agama masih sangat bergantung pada pemerintah, sehingga alokasi anggaran pendidikan lebih banyak ditujukan kepada sekolah-sekolah negeri saja (termasuk madrasah negeri). Sementara itu, sekolah-sekolah umum dan madrasah-madrasah swasta justru kesulitan mendapatkan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan pendidikan di luar swadaya masyarakat yang jumlahnya sangat

terbatas. Secara umum dukungan anggaran bagi pendidikan agama masih belum memadai, sehingga mengalami kesulitan dalam upaya meningkatkan mutu.

- b. Madrasah umumnya relatif tertinggal baik dilihat dari aspek mutu, manajemen, maupun kelembagaan. Mutu pendidikan di madrasah memang masih rendah, yang pada umumnya disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana, minimnya fasilitas pendukung, dan rendahnya mutu guru serta tenaga kependidikan lainnya.
- c. Selain itu, input berupa anak didik (murid) yang dimiliki madrasah pada dasarnya juga bermutu rendah. Murid-murid madrasah mayoritas berasal dari keluarga miskin; latar belakang sosial ekonomi orang tua murid termasuk kategori Pra Sejahtera. Karena itu, tak terlalu berlebihan bila ada kesan umum bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang terkebelakang, marjinal, “kumuh”, dan sangat jauh dari modern. Sebab itu, sebagian besar madrasah memang berlokasi di wilayah pedesaan, dan pada umumnya melayani pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.
- d. Dukungan terhadap pesantren dalam mengemban misi sebagai penyelenggara pendidikan belum maksimal. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada pesantren, selain besarnya (jumlah dana) amat kecil, juga belum mampu mengcover seluruh pesantren yang ada.
- e. Selain itu, intervensi pemerintah (melalui subsidi) berupa (*block grand*) belum mampu menjangkau pesantren salafiah, sehingga pesantren jenis ini hampir luput dari perhatian pemerintah.

Pembangunan bidang agama ini juga telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Kehidupan keagamaan tampak kian semarak yang terrefleksikan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Umat beragama terlihat begitu giat dan makin bergairah dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Pengkajian dan pendalaman agama juga intensif dilakukan; untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kesemarakan kehidupan beragama juga tercermin pada makin banyaknya tempat peribadatan berbagai agama yang dibangun oleh masyarakat. Sementara itu, pemerintah turut memberikan bantuan dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan tempat peribadatan termasuk rehabilitasi.

Meskipun pembinaan kehidupan beragama telah membuahkan hasil yang relatif baik, namun akhir-akhir ini gejala yang dapat diamati, misalnya praktik perjudian, perilaku asusila, pengedaran dan pemakaian narkoba, dan perilaku permisif yang tidak lagi mengindahkan adab kesopanan dan kesantunan. Gejala tersebut mewartakan agama mulai rapuh, dan (2) terjadi kesenjangan antara kesemarak kehidupan keagamaan disatu pihak, dan perilaku sosial yang bertentangan dengan norma-norma agama dilain pihak.

Kenyataan bahwa masyarakat Lampung Barat sangat mejemuk dari segi etnis, agama, adat istiadat, maupun budaya. Berdasarkan data Lampung Barat Dalam Angka (2000), pada tahun 1998 jumlah penduduk pemeluk agama Islam sebanyak 353,253 jiwa, Kristen/Protestan 866 jiwa, Katolik 553 jiwa, Hindu 548; dan Budha 62 jiwa. Kemajemukan sosial ini merupakan khasanah daerah yang bisa menjadi instrumen integratif dan sekaligus faktor disintegratif. Di satu pihak, kemajemukan dapat dijadikan sebagai elemen perekat yang dapat memperkuat kohesi sosial, namun dilain pihak kemajemukan justru menjadi faktor paling potensial yang dapat menyulut konflik-konflik dalam masyarakat.

Pemerintah telah menata sistem kerukunan hidup antarumat beragama dengan adanya SKB antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1969 dan No. 1 Tahun 1979, yang mengatur tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Penyiaran Agama. Bahkan telah diperkuat dengan Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup antar umat beragama.

Namun, selama dua tahun terakhir ini muncul sejumlah ketegangan sosial yang mengarah kepada konflik antar umat beragama, yang terjadi hampir di banyak tempat dan daerah di Bumi Indonesia; tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Lampung Barat.

5.1.2 Tantangan

Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya melalui peningkatan kualitas pendidikan menjadi sangat penting. Sebagaimana permasalahan pendidikan yang disebutkan di atas, maka tantangan pembangunan pendidikan kedepan menjadi sangat besar, terutama dalam hal: (1)meningkatkan pemerataan pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 7-12 tahun) tetapi tidak memperoleh kesempatan bersekolah karena alasan ekonomi (keluarga miskin),

keterbatasan sarana pendidikan (gedung sekolah), dan keterbatasan sarana perhubungan terutama di desa-desa terpencil; (2) tetap menjalankan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sekalipun pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini; (3) meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya, seiring dengan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya; (4) pemerataan distribusi guru yang berkualitas ke seluruh wilayah dan pada berbagai bidang studi; (5) meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang pendidikan; (6) meningkatkan peran Dinas Pendidikan Nasional dalam rangka desentralisasi pendidikan serta melaksanakan program-program pendidikan yang terpadu yang melibatkan lembaga pemerintah dan lembaga sektoral lainnya, dan (7) memberikan kepercayaan kepada sekolah dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan peserta didiknya.

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan sistem informasi kependudukan yang mencakup kuantitas, kualitas dan mobilitas, yang tersedia dengan mutu yang baik, pada saat yang tepat, dan dapat diperoleh dengan mudah. Informasi harus tersedia di segala tingkatan, dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Namun demikian, hingga saat ini belum terwujud sistem informasi kependudukan yang disebabkan karena belum terlaksananya registrasi lahir, mati, dan pindah penduduk secara menyeluruh dan sistematis.

Dalam pelaksanaan program keluarga berencana tantangan yang dihadapi selama lima tahun kedepan adalah mengoptimalkan kinerja program keluarga berencana sehingga tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan terkendalinya pertumbuhan penduduk dapat tercapai.

Dalam mengatasi masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan sangat besar dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan. Namun, masih banyak kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang belum peka gender, yaitu yang belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, dan kepentingan antara perempuan dan laki-laki serta belum menetapkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai sasaran akhir dari pembangunan.

Dalam pembangunan kesehatan beberapa isu strategis yang merupakan tantangan yang harus dihadapi adalah:

- (1) Sebagian dari masalah kesehatan, tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan dan sektor lain sehingga upaya pemecahan masalah harus secara strategis melibatkan sektor terkait. Tantangan utama adalah upaya meningkatkan kerjasama lintas sektoral yang lebih berdayaguna dan berhasil guna, mengingat selama ini kurang berhasil.
- (2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kesehatan, di berbagai bidang kesehatan termasuk pengelola kesehatan di setiap tingkat administrasi.
- (3) Meningkatkan mutu pelayanan di setiap jenjang yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pembangunan pendidikan agama di Kabupaten Lampung Barat tantangan yang dihadapi adalah:

- a. Pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Kabupaten Lampung Barat yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan agama, dan umumnya diselenggarakan oleh masyarakat (swasta).
- b. Mutu pendidikan di madrasah yang masih rendah, yang pada umumnya disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana, minimnya fasilitas pendukung, dan rendahnya mutu guru serta tenaga kependidikan lainnya.
- c. Oleh karena murid-murid madrasah mayoritas berasal dari keluarga miskin; latar belakang sosial ekonomi orang tua murid termasuk kategori Pra Sejahtera, menjadi suatu tantangan bagi pemerintah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga pada umumnya agar input berupa anak didik (murid) yang dimiliki madrasah menjadi baik.
- d. Memperbaiki mutu dan meningkatkan *performance* madrasah antara lain menambah/membangun gedung madrasah baru, merehabilitasi/merevitalisasi madrasah yang mengalami kerusakan ringan sampai berat, serta melengkapi sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Dalam pembangunan kehidupan beragama tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan baik melalui dakwah maupun bimbingan agama, agar masyarakat memperoleh pemahaman agama dengan baik sekaligus dapat mengamalkannya secara benar. Selain itu, penanaman dan sosialisasi nilai-nilai agama yang perlu dilakukan sejak dini di dalam keluarga dan makin diperkuat di lingkungan sekolah serta masyarakat, agar dapat diinternalisasi oleh setiap individu. Dengan demikian,

pelayanan kehidupan beragama akan terus mengalami peningkatan, sehingga umat beragama mendapat kemudahan dalam melaksanakan ibadahnya.

Tantangan lainnya adalah dalam kaitannya dengan kerukunan hidup antar umat beragama. Kenyataan bahwa masyarakat Lampung Barat amat majemuk dari segi etnis, agama, adat istiadat, maupun budaya, dan kemajemukan sosial ini merupakan khasanah daerah yang bisa menjadi instrumen integrative dan sekaligus faktor disintegratif. Di satu pihak kemajemukan dapat dijadikan sebagai elemen perekat yang dapat memperkuat kohesi sosial, namun dilain pihak kemajemukan justru menjadi faktor paling potensial yang dapat menyulut konflik-konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan dan pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Lampung Barat sebaiknya menjadi agenda yang harus ditempatkan pada salah satu urutan prioritas.

5.2 TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan sumber daya manusia terkait erat dengan peran SDM sebagai pelaku pembangunan yang harus memiliki etos kerja produktif, terampil, kreatif, disiplin, professional serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai pengetahuan dan teknologi (iptek) yang berwawasan lingkungan maupun kemampuan manajemen. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika, maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Barat bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat yang profesional
- (2) Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olah raga
- (3) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- (4) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk kurang dari 2% per tahun

- (5) Memberdayakan peranan gender dalam pembangunan
- (6) Meningkatkan kualitas akhlak masyarakat.

Sedangkan, sasaran-sasaran pembangunan di bidang sumberdaya manusia di Kabupaten Lampung Barat adalah:

- (1) Terciptanya sumberdaya manusia yang professional
- (2) Terwujudnya peningkatan kualitas keprmdudaan dan olah raga
- (3) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
- (4) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk kurang dari 2% per tahun
- (5) Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan
- (6) Terciptanya masyarakat berakhlak mulia

5.3 STRATEGI KEBIJAKAN

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang sumberdaya manusia di Kabupaten Lampung Barat sekaligus mengatasi permasalahan yang ada, maka diperlukan strategi kebijakan sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kualitas aparaturn pemerintah
- (2) Peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah
- (3) Peningkatan aktivitas kepemudaan dan olah raga.
- (4) Pelayanan kesehatan secara professional.
- (5) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
- (6) Peningkatan keberdayaan perempuan dalam proses pembangunan.
- (7) Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan agama.
- (8) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan agama.
- (9) Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama.
- (10) Peningkatan peran lembaga peradilan agama.

5.4 PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam rangka mengimplementasikan strategi kebijakan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat tersebut di atas disusun program-program pembangunan di bidang sumberdaya manusia, yaitu:

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
- (2) Rekrutmen tenaga widiaiswara
- (3) Perbaikan sistem pendidikan dasar dan menengah
- (4) Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah
- (5) Peningkatan kualitas pendidikan laur sekolah
- (6) Pendidikan dan latihan kemampuan berorganisasi, berwiraswasta, dan penguasaan IPTEK
- (7) Pembinaan kelembagaan dan organisasi olah raga
- (8) Memfasilitasi berkembangnya sarana dan prasarana olah raga
- (9) Memfasilitasi pemanduan bakat, pembiitan dan peningkatan prestasi olah raga
- (10) Sosialisasi dan penerapan perilaku hidup sehat dan peninkatan pelayanan prima
- (11) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dokter dan paramedis
- (12) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
- (13) Pengawasan obat, makanan, dan bahan bernahaya
- (14) Memfasilitasi penyuluhan program keluarga berencana (KB)
- (15) Kependudukan dan catatan sipil
- (16) Pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan gizi masyarakat
- (17) Pemberdayaan perempuan dalam bidang aparatur, politik, hukum, ekonomi, dan hak asasi manusia (HAM)
- (18) Pemantapan kelembagaan perempuan
- (19) Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan agama
- (20) Memfasilitasi penambahan tenaga guru pendidikan agama

- (21) Memfasilitasi pengembangan/perbaikan sistem pendidikan agama
- (22) Memfasilitasi kuantitas dan kualitas guru agama
- (23) Memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji di daerah
- (24) Melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaan dan MTQ
- (25) Penambahan tenaga penyuluh agama dan mubaligh
- (26) Sosialisasi keluarga sakinah, UU Perkawinan Ni. 1 tahun 1974 dan UU Zakat tahun 1999.
- (27) Memfasilitasi penyuluhan hukum-hukum agama bagi masyarakat

BAB VI. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

6.1 KONDISI SAAT INI

6.1.1 Masalah

Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga berpotensi menimbulkan dampak negatif dan sebagai sumber pencemaran lingkungan. Kegiatan sektoral yang berpeluang menimbulkan dampak negatif adalah (1) kehutanan, (2) pertanian, (3) pertambangan, (4) industri, (5) pemanfaatan ruang disempadan pantai

(1) Kehutanan

Kegiatan sekitar kehutanan yang dominan di Kabupaten Lampung Barat adalah eksploitasi dan pembinaan hutan. Pada tahun 1998, produksi kayu bulat adalah 476,9 M3. Selain itu tercatat pula produksi non kayu seperti arang 200 ton damar resin 2.741 ton, rotan 75 ton, dan rotan manau 1.027 batang. Keberhasilan pembinaan hutan, khususnya reboisasi dan konservasi tanah yang selama ini telah terlaksana penghijauan seluas 200 Ha, pemeliharaan tanaman penghijauan seluas 3.000 Ha, serta pembuatan hutan rakyat sebanyak 15 unit (Lampung Barat dalam angka 2000).

Di dalam kawasan hutan lindung masih banyak dijumpai kegiatan penambahan hutan. Kawasan hutan yang terdapat di areal pegunungan, selain berfungsi sebagai penunjang udidaya, sumberdaya hutan berfungsi juga sebagai pengatur tata air, pengawas plasma nutfah dan penyangga sistem kehidupan.

Perusakan hutan akan berdampak luas kepada kegiatan dibagian hilir, seperti lahan pertanian, sumber air baku pertanian dan PDAM, serta sumber air tanah.

Dampak negatif yang cukup menonjol dari eksploitasi hutan adalah erosi, banjir, fluktuasi debit sungai yang tajam, sedimentasi sungai, penurunan kesuburan tanah, penurunan struktur dan potensi hutan, penurunan kelimpahan satwa, dan kelangkaan air tanah.

(2) Pertanian

Kegiatan sektor pertanian yang dilakukan di Lampung Barat bertumpu pada kegiatan pertanian lahan sawah dan lahan kering dengan komoditas padi, palawija dan hortikoltura serta perkebunan. Dampak yang menonjol dari usaha tani tersebut adalah erosi, aliran permukaan, eutrofikasi, ledakan hama dan penyakit, serta penurunan kesuburan tanah.

(3) Pertambangan

Dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat terdapat beraneka ragam endapan mineral, bahan galian sebagai potensi alam yang sangat bermanfaat bagi pembangunan. Jenis bahan galian golongan A yang diperkirakan ada yaitu batubara. Bahan galian golongan B berupa emas, perak, tembaga, seng, belerang, pasir besi dan mangan. Sedangkan bahan galian golongan C meliputi batu apung, tufa, perlit, tras, batu gamping, marmer, pasir, krakas, diatomi, kaolin dan tanah liat.

Selain itu, juga terdapat sumber panas dan gas bumi yang berasal dari aktivitas vulkanis air panas. Selama ini perusahaan bahan galian tersebut masih diusahakan secara kecil-kecilan oleh masyarakat dan masih merupakan usaha sampingan.

Karena sumberdaya mineral ini tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dampaknya terhadap lingkungan cukup besar, maka bahan tambang ini harus memberikan nilai dayaguna yang tinggi bagi perekonomian daerah serta dampak negatif penambangannya harus ditanggulangi semaksimal mungkin.

(4) Sektor Industri

Sektor industri telah memberikan kontribusi cukup besar dalam struktur perekonomian Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, sektor ini juga telah memberikan kesempatan kerja dan nilai tambah produksi pertanian.

Perkembangan industri di Lampung Barat kini dan mendatang didominasi oleh industri yang berorientasi ekspor. Pengembangan agroindustri terus diimbangi dengan upaya penanganan dan pengendalian pencemaran yang ditimbulkannya. Karena umumnya agroindustri cukup potensial menimbulkan pencemaran.

Dampak erosi dan pencemaran akan menyebar sesuai dengan daur hidrologis di dalam ekosistem DAS yakni akan beredar sesuai pola aliran sungai dalam DAS, peredaran tersebut cenderung berakumulasi pada daerah hilir sungai.

Dampak turunan pada daerah hilir sungai adalah peluang terjadinya banjir dan rusaknya tatanan fungsi ekosistem hutan bakau, terutama di daerah hilir Way Besai dan Way Semangka, kerusakan yang paling menonjol dari ekosistem hutan bakau adalah menurunnya fungsi wilayah asuh biota laut. Penurunan fungsi wilayah asuh ini akan memberikan kontribusi terhadap penurunan tangkapan ikan di laut dan estuaria.

6.1.2 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya alam dimasa depan adalah bagaimana memanfaatkan dan memelihara sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Di sisi lain, dampak negatif yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini terutama berkaitan dengan makin meluasnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang makin baik dan merata.

6.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan sumberdaya alam di Kabupaten Lampung Barat adalah pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. Sedangkan sasaran pembangunan sumberdaya alam adalah :

- (1) Termanfaatnya sumberdaya alam secara optimal dan berkesinambungan.
- (2) Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkesinambungan
- (3) Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

6.3 STRATEGI KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas dan sekaligus mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka strategi kebijakan yang ditempuh adalah :

- (1) Peningkatan penmanfaatan sumberdaya alam secara optimal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan
- (3) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

6.4 PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam melaksanakan strategi kebijakan tersebut, program pembangunan sumberdaya alam Kabupaten Lampung Barat dalam lima tahun mendatang adalah :

- (1) Inventarisasi potensi sumberdaya hutan, pesisir dan kelautan, serta tambang.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan potensi, sumberdaya hutan, pesisir dan kelautan, serta tambang
- (3) Pengelolaan sumberdaya hutan, pesisir dan kelautan serta tambang
- (4) Penyuluhan dan pembinaan pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan
- (5) Penyusunan neraca sumberdaya alam (NSDA)
- (6) Pengendalian permasalahan lingkungan hidup
- (7) Penataan ruang wilayah kabupaten, kota dan kawasan
- (8) Penataam wilayah Kota Liwa dan Krui
- (9) Pengembangan model lingkungan hidup berkelanjutan

BAB VII. PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT

7.1 KONDISI SAAT INI

7.1.1 Masalah

Sebagai daerah yang majemuk, baik dari segi suku, budaya maupun agama, menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah yang kaya khasanah adat istiadat. Kekayaan khasanah tersebut patut terus dipelihara, untuk memperkuat identitas dan jati diri masyarakat.

Namun disadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum banyak menyentuh dan memberdayakan lembaga, hukum, dan norma adat sehingga belum berperan secara optimal dalam pembangunan Lampung Barat. Peran kelembagaan ada hanya dipandang *sebelah mata* dan hanya dilakukan pada acara-acara *seremonial* saja. Akibatnya, selain dapat memusnahkan kelembagaan adat itu sendiri, juga perkembangan kelembagaan adat menjadi salah arah seperti : cenderung menimbulkan paham kedaerahan yang sempit, sikap feodal dan eksklusif, serta individualistik. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan persaingan antar anggota dan antar kelompok masyarakat yang tidak sehat dan negatif yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pertikaian paham dan perpecahan dalam masyarakat.

Dalam masa pergantian abad ini, dimana proses reformasi dan demokratisasi sedang melanda negeri kita, masalah tergusurnya nilai-nilai luhur bangsa bisa menjadi ancaman bagi pembangunan daerah. Jika hal ini dibiarkan, maka dapat mengakibatkan terjadi pedangkalan nilai-nilai moral dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang pada gilirannya dapat mengakibatkan krisis jati diri dan kepribadian.

Permasalahan lain yang timbul dalam pemberdayaan kelembagaan adat adalah makin menurunnya kesadaran dan perhatian masyarakat dalam usaha-usaha penyelamatan, pemeliharaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan norma dan hukum adat. Rendahnya kesadaran masyarakat tersebut lebih lanjut dapat mengakibatkan semakin menurunnya peran kelembagaan adat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

7.1.2 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan keberdayaan kelembagaan dalam pembangunan lima tahun mendatang adalah derasnya arus informasi dan masuknya nilai dari luar yang tidak sesuai dengan nilai adat istiadat dan budaya daerah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan nilai-nilai moral dan nilai-nilai luhur adat istiadat dan budaya Kabupaten Lampung Barat, yang lebih lanjut menyebabkan tidak berfungsi kelembagaan adat secara optimal, serta dapat menimbulkan konflik dan pertentangan antar kelompok masyarakat, antar lingkungan/desa, antara agama dan antar etnik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perlindungan, dan pemanfaatan nilai-nilai luhur warisan budaya agar lebih berdaya dan bermanfaat bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat.

7.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam peningkatan keberdayaan lembaga adat adalah mewujudkan kelembagaan adat dalam pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya lembaga adat yang berperan aktif dalam pembangunan.

7.3 STRATEGI KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut di atas ditetapkan strategi kebijakan, yaitu pemberdayaan lembaga adat dalam proses pembangunan.

7.4 PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam rangka mengimplementasikan strategi kebijakan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat tersebut di atas maka program pembangunannya adalah pembinaan dan pengembangan lembaga adat.

BAB VIII. KEPARIWISATAAN

8.1 KONDISI SAAT INI

8.1.1 Masalah

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai potensi cukup cerah dalam pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Beberapa obyek wisata di Kabupaten Lampung Barat yang menarik, memiliki ciri khas dan sudah dikenal luas antara lain :

- (1) Wisata Alam: *Gunung Seminung, Gunung Sebayayan, Gunung Tapak Tunggak, Gunung Punggung, Gunung Pelalawan, Gunung Kawat Kerambi, Gunung Subhanallah, Gunung Pematang Beringin, Gunung Pesagi, Gunung Tanjung Jati, Bumi Perkemahan Sukaraja, Air Panas Belerang (Air Putih; Air Abang; Air Kelat), Taman Nasional Bukit Barisan I, Danau Ranau, Bukit Plelawan, Air Terjun Sepapak, Air Terjun Sepapak Kiri, Air terjun Sendalapi, Hitan Damar.*
- (2) Wisata Budaya: *Kompleks Megalitik, Kompleks Bernasi, Batu Kepampang, Rumah Tua, Lamban Gedung, Perkampungan Lpmbok, Upacara Mandi Belimau, Upacara Ngumbai.*
- (3) Wisata Sejarah: *Gunung Pesagi, Makam Bugukh Sakti dan*
- (4) Wisata Pantai : *Pantai Henihebakh, Gua Batu, Pantai Krui, Pantai Maghnai, Pantai Selalau-Walur, Pulau Pisang.*

Pengembangan sektor pariwisata dapat berpengaruh positif dalam meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penerimaan devisa bagi negara dan pendapatan daerah, serta dapat memanfaatkan dan menyerap potensi sumberdaya manusia yang cukup besar. Terkait dengan pembangunan sektor ini adalah pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan seperti objek wisata, transportasi, telekomunikasi, industri cinderamata, dan fasilitas lainnya serta dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat luas dan dunia usaha.

Akan tetapi, pengembangan sektor wisata di Kabupaten Lampung Barat belumlah dilakukan secara optimal, bahkan kurang berkembang. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata, jaringan listrik, air bersih dan terbatasnya

objek wisata. Akibat lebih lanjut dari keterbatasan ini adalah masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara ke Kabupaten Lampung Barat, lama tinggal hanya 1-2 hari, dan pengeluaran wisatawan hanya sekitar Rp 30.000.00, sehingga belum memberikan nilai ekonomi yang memadai. Keadaan ini masih sangat jauh dari harapan, yaitu menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, bahkan menunjukkan adanya kecenderungan menurunnya kualitas lingkungan objek-objek pariwisata yang potensial.

8.1.2 Tantangan

Potensi kepariwisataan di Kabupaten Lampung Barat yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal walaupun posisinya sangat strategis dekat Pulau Jawa, membuat kegiatan ini belum menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi merupakan tantangan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Barat. Terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata yang ada masih menuntut berbagai perencanaan dan pelaksanaan yang terarah dan terpadu diantara pihak-pihak yang terkait.

Selain itu, tantangan-tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan sektor wisata di Kabupaten Lampung Barat adalah masih terbatasnya peran aktif masyarakat, investasi swasta dan masyarakat di sektor pariwisata masih terbatas, objek pariwisata yang ada belum dikenal luas, serta masih terbatasnya sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga kelancaran dan pelayanan pariwisata masih kurang memadai. Di sisi lain, adanya persaingan baik regional maupun nasional merupakan tantangan dalam pemasaran produk-produk wisata Kabupaten Lampung Barat.

8.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Lampung Barat dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan peran kepariwisataan dalam pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, sehingga mampu menjadi sektor andalan dalam menggalakkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya kepariwisataan berbasis sumberdaya alam dan budaya daerah.

8.3 STRATEGI KEBIJAKAN

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi kebijakan yang ditetapkan adalah:

- (1) Pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya daerah sebagai objek wisata.
- (2) Pembinaan seni dan budaya daerah.
- (3) Promosi kepaiwisataan.

8.4 PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam rangka mengimplementasikan strategi kebijaksanaan pembangunan kepariwisataan tersebut di atas disusun program-program pembangunan yaitu:

- (1) Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata.
- (2) Penyusunan sadar wisata baik kepada pihak pemerintah terutama sektor terkait maupun kepada dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Memfasilitasi penyediaan infrastruktur bagi pengembangan pariwisata.
- (4) Pembinaan seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah.
- (5) Memfasilitasi peningkatan sarana dan fasilitas pengembangan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah.
- (6) Peningkatan sarana promosi baik cetak maupun visual.
- (7) Pengiriman duta wisata dalam event pariwisata.

BAB IX. PENUTUP

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menyusun Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Kabupaten Lampung Barat. Tindak lanjut dari POLDAS pembangunan tersebut dan sebagai langkah konkrit dalam perencanaan pembangunan daerah, maka disusunlah Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005. PROPEDA ini merupakan arahan dan pedoman bagi masyarakat, swasta, aparatur pemerintahan daerah dan aparatur pemerintahan pusat di daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga cita-cita bangsa Indonesia di daerah dapat terwujud. Lebih lanjut PROPEDA ini akan dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang ditetapkan Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 03 TAHUN 2001
TANGGAL : 19 PEBRUARI 2001
TENTANG : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001-2005

MATRIK PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) 2001-2005

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

VISI: Terwujudnya Masyarakat Lampung Barat yang Madani, Berakhlak Mulia, dan Sejahtera dengan Melaksanakan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, dan Pariwisata yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

MISI SATU: Melaksanakan Otonomi Daerah

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1. Terselenggaranya pembangunan berdasarkan kekuatan daerah	1. Penguatan kelembagaan masyarakat	1. Pendidikan dan pelatihan pengurus kelembagaan masyarakat	Terselenggaranya DIKLAT kelembagaan masyarakat
		2. Inventarisasi lembaga-lembaga kemasyarakatan	Tersedianya data tentang lembaga-lembaga kemasyarakatan
		3. Pembentukan dan pembinaan lembaga masyarakat	Jumlah lembaga masyarakat meningkat
2. Terciptanya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien	2. Peningkatan keberdayaan masyarakat	4. Sosialisasi dan diseminasi program pembangunan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi 1 kali per tahun
		5. Mengikutsertakan lembaga masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan
		6. Pembentukan dan pengembangan forum komunikasi antar lembaga masyarakat dalam proses pembangunan	Terbentuknya forum komunikasi antar lembaga masyarakat

MISI SATU: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
	3. Pelaksanaan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat	7. Pertemuan koordinasi antarsektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik	Terlaksananya pertemuan koordinasi antarsektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik
3. Terciptanya kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien	4. Peninjauan kembali lembaga pemerintah yang sesuai kebutuhan	8. Evaluasi lembaga pemerintahan	Optimalnya lembaga pemerintahan
		9. Pembentukan kembali lembaga pemerintahan yang sesuai kebutuhan	Tertatanya lembaga pemerintahan yang dibutuhkan
		10. Sosialisasi dan diseminasi lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi

MISI DUA: Melaksanakan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis dan Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1. Terciptanya aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat yang bersih	1. Pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat	1. Pendidikan dan latihan aparatur pemerintah dan dunia usaha	Terselenggaranya diklat bagi aparatur pemerintah
		2. Studi lanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi bagi aparatur pemerintah	Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah yang melanjutkan studi/pendidikan
		3. Penjenjangan karier struktural dan fungsional	Terlaksananya jenjang karier struktural dan fungsional bagi aparatur pemerintah
2. Terciptanya manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien	2. Pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien	4. Analisis fungsi tugas dan jabatan	Efisien dan efektifnya manajemen pemerintahan
		5. Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan termasuk Pekon	Efisien dan efektifnya manajemen pemerintahan dan otonomi Pekon
3. Terwujudnya sistem politik yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	3. Peningkatan peran organisasi politik di dalam proses demokrasi	6. Pendidikan dan pelatihan sistem politik yang demokratis dan dinamis bagi anggota DPRD, Pengurus organisasi politik dan masyarakat	Terselenggaranya diklat sistem politik bagi anggota DPRD, Pengurus organisasi politik dan masyarakat
		7. Peningkatan sarana dan prasarana pemilu yang memadai	Tersedianya sarana dan prasarana proses demokrasi politik
4. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan dinamis	4. Peningkatan dan pengembangan proses politik yang demokratis dan dinamis	8. Penyuluhan tentang PEMILU yang JURDIL kepada masyarakat	Terselenggaranya PEMILU dengan JURDIL
		9. Penyediaan sarana dan prasarana pemilu yang memadai	Tersedianya sarana dan prasarana pemilu yang memadai

MISI DUA: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
		10. Rekrutmen penyelenggara pemilu yang profesional	Terbentuknya penyelenggara pemilu yang profesional
5. Tertatanya sistem hukum daerah	5. Penyempurnaan dan pengembangan materi hukum	11. Inventarisasi, evaluasi, dan revisi peraturan perundangan di daerah	Tertatanya peraturan perundang-undangan di daerah
		12. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di daerah	Tersusunnya PERDA yang sesuai konisi daerah
		13. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan di daerah	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi perundang-undangan di daerah
	6. Menata kelembagaan hukum di daerah	14. Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terlaksananya peraturan perundang-undangan di daerah
6. Terwujudnya kondisi yang tertib, aman, damai, dan stabil	7. Peningkatan budaya KADARKUM	15. Penyuluhan KADARKUM	Terselenggaranya penyuluhan KADARKUM
	8. Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan	16. Penerapan sistem pengawasan aparaturnegak hukum	Tingkat pelanggaran penegakan hukum oleh aparaturnegak hukum
		17. Mendukung penyediaan sarana prasarana penegakan hukum	Tersedianya sarana prasarana penegakan hukum yang layak
		18. Peningkatan operasi yustisi dan bantuan hukum kepada masyarakat	Terlaksananya operasi yustisi dan bantuan hukum sesuai kebutuhan

MISI DUA: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
7. Terwujudnya aparat penegak hukum yang profesional	9. Mendukung pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum	19. Pendidikan dan latihan bagi aparat penegak hukum dan penyidik PNS di daerah	Tersedianya diklat bagi aparat penegakan hukum

MISI TIGA: Meningkatkan Ekonomi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
1. Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4% per tahun	1. Peningkatan laju investasi	1. Promosi dan pengembangan investasi	Terlaksananya temu promosi guna peningkatan investasi sebesar 15% per tahun
		2. Menciptakan dan mengembangkan kerja sama dengan pihak luar	Terjalinnnya kerja sama investasi dengan pihak luar
	2. Intensifikasi, ekstensifikasi, eksplorasi dan rehabilitasi kegiatan ekonomi	3. Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	Meningkatnya produk sumber-sumber ekonomi
		4. Penyuluhan kegiatan ekonomi kepada masyarakat	Terlaksananya penyuluhan 2 kali per tahun
		5. Pengembangan cabang-cabang kegiatan ekonomi potensial	Bertambahnya cabang-cabang kegiatan ekonomi
		6. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan ekonomi
		7. Memfasilitasi kredit mudah dan murah	Meningkatnya penyaluran dan pemanfaatan kredit usaha
2. Pemerataan pendapatan per kapita Rp. 2.091.036	3. Pengembangan UMR/UMP	8. Evaluasi dan peningkatan UMR/UMP	Meningkatnya UMR / UMP sebesar 15% per tahun
	4. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya tenaga kerja	9. Pendidikan dan latihan peningkatan keterampilan tenaga kerja	Meningkatnya keterampilan tenaga kerja

MISI TIGA: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
3. Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis agribisnis berorientasi pasar dan kemitraan	5. Pengembangan agribisnis	10. Perancangan sistem agribisnis potensial (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan/kelautan)	Berkembangnya sistem agribisnis potensial
		11. Penetapan kawasan sentra agribisnis	Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan
		12. Perluasan investasi agribisnis	Nilai investasi agribisnis meningkat 10% per tahun
	6. Pengembangan pasar dan sistem informasi agribisnis	13. Penyusunan sistem informasi pasar	Tersusunnya sistem informasi pasar serta tingkat pemanfaatannya
		14. Mengadakan forum konsultasi bisnis	Terlaksananya forum konsultasi bisnis

MISI EMPAT: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
1. Terciptanya sumberdaya manusia yang profesional	1. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah	1. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan	Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
		2. Rekrutmen tenaga Widiaiswara	Tercukupinya tenaga Widiaiswara
		3. Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah	Efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan bagi aparatur pemerintah daerah
	2. Peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan sekolah di setiap jenjang pendidikan
		5. Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan dan keterampilan luar sekolah
2. Terwujudnya peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga	3. Peningkatkan aktivitas kepemudaan dan olahraga	6. Pendidikan dan latihan kemampuan berorganisasi, berwiraswasta, dan penguasaan IPTEK	Terselenggaranya DIKLAT bagi pemuda
		7. Pembinaan kelembagaan dan organisasi olahraga	Semakin mandirinya kelembagaan dan organisasi olahraga
		8. Memfasilitasi berkembangnya sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
		9. Memfasilitasi pemanduan bakat, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga

MISI EMPAT: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	4. Pelayanan kesehatan secara profesional	10. Sosialisasi dan penerapan perilaku hidup sehat dan peningkatan pelayanan prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		11. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dokter dan paramedis	Terpenuhinya kebutuhan tenaga dokter umum, spesialis, dan paramedis
		12. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana kesehatan
		13. Pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya	Berkurangnya jumlah kasus peredaran dan penggunaan obat serta kasus keracunan pangan
4. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk kurang dari 2% per tahun	5. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	14. Memfasilitasi Penyuluhan program KB	Meningkatnya jumlah peserta KB lestari dan membaiknya kualitas keluarga
		15. Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya pelayanan penduduk dan Catatan Sipil bagi masyarakat
5. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	6. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pembangunan	16. Pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan gizi masyarakat	Tingkat partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi meningkat
		17. Pemberdayaan perempuan dalam bidang aparatur, politik, hukum, ekonomi, dan HAM	Meningkatnya kesadaran perempuan dalam bidang aparatur, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan HAM
		18. Pemanjapan kelembagaan perempuan	Terbentuknya organisasi yang mampu menyelurkan aspirasi perempuan

MISI EMPAT: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
6. Terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia	7. Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan agama	19. Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan agama	Terpenuhinya kebutuhan minimal sarana dan prasarana
		20. Memfasilitasi penambahan tenaga guru pendidikan agama	Terpenuhinya tenaga guru agama
		21. Memfasilitasi pengembangan/perbaikan sistem pendidikan agama	Tesusunnya sistem pendidikan agama sesuai kebutuhan
	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan agama	22. Memfasilitasi kuantitas dan kualitas guru agama	Meningkatnya kuantitas dan kualitas guru agama
	9. Peningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama	23. Memfasilitasi penyelenggaraan ibadah Haji di daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji
		24. Melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaan dan MTQ	Terlaksananya peringatan hari-hari besar keagamaan dan MTQ
		25. Penambahan tenaga penyuluh agama dan mubaligh	Tersedianya tenaga penyuluh agama dan mubaligh sesuai kebutuhan
		26. Sosialisasi keluarga sakinah, UU Perkawinan No. 10 tahun 1974 dan UU Zakat tahun 1999	Menurunnya angka perceraian dan meningkatnya kesadaran membayar zakat
	10. Peningkatan peran lembaga peradilan agama	27. Memfasilitasi penyuluhan hukum-hukum agama bagi masyarakat	Terlaksananya penyuluhan hukum-hukum agama

MISI LIMA: Melaksanakan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
1. Termanfaatkannya sumberdaya alam secara optimal dan berkesinambungan	1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. Inventarisasi potensi sumberdaya hutan, pesisir dan kelautan serta bahan tambang	Tersusunnya database sumberdaya hutan, pesisir dan kelautan, dan bahan tambang
		2. Pengembangan pengelolaan potensi sumberdaya hutan, pesisir dan kelautan serta bahan tambang	Meningkatnya pengelolaan potensi sumberdaya alam
		3. Pengelolaan sumberdaya hutan, pesisir dan kelautan tambang yang berbasis kemasyarakatan	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam
		4. Penyuluhan dan pembinaan pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan	Meningkatnya kesadaran aparat, masyarakat, dan pengusaha tentang lingkungan hidup
		5. Penyusunan neraca sumberdaya alam (NSDA)	Tersusunnya NSDA
2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkesinambungan	2. Pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan	6. Pengendalian permasalahan lingkungan hidup	Terinventarisasinya permasalahan lingkungan hidup dan tindak lanjutnya
		7. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Kota dan Kawasan	Tersedianya dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kawasan serta pendaftarannya
		8. Penataan Wilayah Kota Liwadan Krui	Berkembangnya Kota Liwa sebagai ibukota Kabupaten dan Kota Krui sebagai Kota Perdagangan dan tujuan wisata

		9. Pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Tersedianya model pengelolaan lingkungan hidup
--	--	--	--

MISI LIMA: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
3. Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	3. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	10. Pendidikan dan pelatihan serta pembentukan lembaga pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan lembaga adat tentang lingkungan hidup
		11. Pembentukan kelompok dan forum pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	Terbentuknya kelompok dan forum pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
		12. Rancang bangun teknologi tepat guna pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Diperolehnya teknologi tepat guna pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

MISI ENAM: Meningkatkan Keberdayaan Lembaga Adat dalam Pembangunan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
1. Terwujudnya lembaga adat yang kuat dan berperan aktif dalam pembangunan	1. Pemberdayaan lembaga adat dalam proses pembangunan	1. Pembinaan dan pengembangan lembaga adat	Meningkatnya peran lembaga adat dalam pembangunan

MISI TUJUH: Mengembangkan Kepariwisata yang Berbasis Sumberdaya Alam dan Budaya

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
1. Berkembangnya kepariwisataan berbasis sumberdaya alam dan budaya daerah	1. Pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya daerah sebagai objek wisata	1. Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata	Tersedianya perencanaan tapak kawasan wisata
		2. Penyuluhan sadar wisata baik kepada pihak pemerintah terutama sektor terkait maupun kepada dunia usaha dan masyarakat	Terciptanya suasana yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan
		3. Memfasilitasi penyediaan infrastruktur bagi pengembangan pariwisata	Meningkatkansarana dan prasarana kepariwisataan
	2. Pembinaan seni budaya daerah	4. Pembinaan seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah	Semakin tumbuh dan berkembangnya seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah
		5. Memfasilitasi peningkatan sarana dan fasilitas pengembangan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah	Tersedianya sarana dan fasilitas pengembangan budaya
	3. Promosi kepariwisataan	6. Peningkatan sarana promosi	Tersedianya sarana promosi baik cetak maupun visual yang memadai
		7. Pengiriman duta wisata dalam event pariwisata	Semakin dikenalnya budaya daerah pada event-event pariwisata

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 03 TAHUN 2001
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2001
TENTANG : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001-2005

MATRIK PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) 2001-2005

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

VISI: Terwujudnya Masyarakat Lampung Barat yang Madani, Berakhlak Mulia, dan Sejahtera dengan Melaksanakan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, dan Pariwisata yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

MISI SATU: Melaksanakan Otonomi Daerah

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
4. Terselenggaranya pembangunan berdasarkan kekuatan daerah	5. Penguatan kelembagaan masyarakat	1. Pendidikan dan pelatihan pengurus kelembagaan masyarakat	Terselenggaranya DIKLAT kelembagaan masyarakat
		2. Inventarisasi lembaga-lembaga kemasyarakatan	Tersedianya data tentang lembaga-lembaga kemasyarakatan
		11. Pembentukan dan pembinaan lembaga masyarakat	Jumlah lembaga masyarakat meningkat
5. Terciptanya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien	6. Peningkatan keberdayaan masyarakat	12. Sosialisasi dan diseminasi program pembangunan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi 1 kali per tahun
		13. Mengikutsertakan lembaga masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan
		14. Pembentukan dan pengembangan forum komunikasi antar lembaga masyarakat dalam proses pembangunan	Terbentuknya forum komunikasi antar lembaga masyarakat

MISI SATU: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
	7. Pelaksanaan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat	15. Pertemuan koordinasi antarsektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik	Terlaksananya pertemuan koordinasi antarsektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik
6. Terciptanya kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien	8. Peninjauan kembali lembaga pemerintah yang sesuai kebutuhan	16. Evaluasi lembaga pemerintahan	Optimalnya lembaga pemerintahan
		17. Pembentukan kembali lembaga pemerintahan yang sesuai kebutuhan	Tertatanya lembaga pemerintahan yang dibutuhkan
		18. Sosialisasi dan diseminasi lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi

MISI DUA: Melaksanakan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis dan Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
8. Terciptanya aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat yang bersih	10. Pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat	20. Pendidikan dan latihan aparatur pemerintah dan dunia usaha	Terselenggaranya diklat bagi aparatur pemerintah
		21. Studi lanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi bagi aparatur pemerintah	Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah yang melanjutkan studi/pendidikan
		22. Penjenjangan karier struktural dan fungsional	Terlaksananya jenjang karier struktural dan fungsional bagi aparatur pemerintah
9. Terciptanya manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien	11. Pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien	23. Analisis fungsi tugas dan jabatan	Efisien dan efektifnya manajemen pemerintahan
		24. Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan termasuk Pekon	Efisien dan efektifnya manajemen pemerintahan dan otonomi Pekon
10. Terwujudnya sistem politik yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	12. Peningkatan peran organisasi politik di dalam proses demokrasi	25. Pendidikan dan pelatihan sistem politik yang demokratis dan dinamis bagi anggota DPRD, Pengurus organisasi politik dan masyarakat	Terselenggaranya diklat sistem politik bagi anggota DPRD, Pengurus organisasi politik dan masyarakat
		26. Peningkatan sarana dan prasarana pemilu yang memadai	Tersedianya sarana dan prasarana proses demokrasi politik
11. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan dinamis	13. Peningkatan dan pengembangan proses politik yang demokratis dan dinamis	27. Penyuluhan tentang PEMILU yang JURDIL kepada masyarakat	Terselenggaranya PEMILU dengan JURDIL
		28. Penyediaan sarana dan prasarana pemilu yang memadai	Tersedianya sarana dan prasarana pemilu yang memadai

MISI DUA: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
		29. Rekrutmen penyelenggara pemilu yang profesional	Terbentuknya penyelenggara pemilu yang profesional
12. Tertatanya sistem hukum daerah	14. Penyempurnaan dan pengembangan materi hukum	30. Inventarisasi, evaluasi, dan revisi peraturan perundangan di daerah	Tertatanya peraturan perundang-undangan di daerah
		31. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di daerah	Tersusunnya PERDA yang sesuai konisi daerah
		32. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan di daerah	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi perundang-undangan di daerah
	15. Menata kelembagaan hukum di daerah	33. Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terlaksananya peraturan perundang-undangan di daerah
13. Terwujudnya kondisi yang tertib, aman, damai, dan stabil	16. Peningkatan budaya KADARKUM	34. Penyuluhan KADARKUM	Terselenggaranya penyuluhan KADARKUM
	17. Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan	35. Penerapan sistem pengawasan aparaturnegak hukum	Tingkat pelanggaran penegakan hukum oleh aparaturnegak hukum menurun
		36. Mendukung penyediaan sarana prasarana penegakan hukum	Tersedianya sarana prasarana penegakan hukum yang layak
		37. Peningkatan operasi yustisi dan bantuan hukum kepada masyarakat	Terlaksananya operasi yustisi dan bantuan hukum sesuai kebutuhan

MISI DUA: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
14. Terwujudnya aparat penegak hukum yang profesional	18. Mendukung pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum	38. Pendidikan dan latihan bagi aparat penegak hukum dan penyidik PNS di daerah	Tersedianya diklat bagi aparat penegakan hukum

MISI TIGA: Meningkatkan Ekonomi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA
4. Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4% per tahun	7. Peningkatan laju investasi	15. Promosi dan pengembangan investasi	Terlaksananya temu promosi guna peningkatan investasi sebesar 15% per tahun
		16. Menciptakan dan mengembangkan kerja sama dengan pihak luar	Terjalannya kerja sama investasi dengan pihak luar
	8. Intensifikasi, ekstensifikasi, eksplorasi dan rehabilitasi kegiatan ekonomi	17. Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	Meningkatnya produk sumber-sumber ekonomi
		18. Penyuluhan kegiatan ekonomi kepada masyarakat	Terlaksananya penyuluhan 2 kali per tahun
		19. Pengembangan cabang-cabang kegiatan ekonomi potensial	Bertambahnya cabang-cabang kegiatan ekonomi
		20. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan ekonomi
	21. Memfasilitasi kredit mudah dan murah	Meningkatnya penyaluran dan pemanfaatan kredit usaha	
5. Pemerataan pendapatan per kapita Rp. 2.091.036	9. Pengembangan UMR/UMP	22. Evaluasi dan peningkatan UMR/UMP	Meningkatnya UMR / UMP sebesar 15% per tahun
	10. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya tenaga kerja	23. Pendidikan dan latihan peningkatan keterampilan tenaga kerja	Meningkatnya keterampilan tenaga kerja

MISI TIGA: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
6. Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis agribisnis berorientasi pasar dan kemitraan	11. Pengembangan agribisnis	24. Perancangan sistem agribisnis potensial (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan/kelautan)	Berkembangnya sistem agribisnis potensial
		25. Penetapan kawasan sentra agribisnis	Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan
		26. Perluasan investasi agribisnis	Nilai investasi agribisnis meningkat 10% per tahun
	12. Pengembangan pasar dan sistem informasi agribisnis	27. Penyusunan sistem informasi pasar	Tersusunnya sistem informasi pasar serta tingkat pemanfaatannya
		28. Mengadakan forum konsultasi bisnis	Terlaksananya forum konsultasi bisnis

MISI EMPAT: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
7. Terciptanya sumberdaya manusia yang profesional	11. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah	1. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan	Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
		2. Rekrutmen tenaga Widiaiswara	Tercukupinya tenaga Widiaiswara
		3. Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah	Efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan bagi aparatur pemerintah daerah
	12. Peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan sekolah di setiap jenjang pendidikan
		5. Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan dan keterampilan luar sekolah
8. Terwujudnya peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga	13. Peningkatkan aktivitas kepemudaan dan olahraga	6. Pendidikan dan latihan kemampuan berorganisasi, berwiraswasta, dan penguasaan IPTEK	Terselenggaranya DIKLAT bagi pemuda
		7. Pembinaan kelembagaan dan organisasi olahraga	Semakin mandirinya kelembagaan dan organisasi olahraga
		8. Memfasilitasi berkembangnya sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
		9. Memfasilitasi pemanduan bakat, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga

MISI EMPAT: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
9. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	14. Pelayanan kesehatan secara profesional	10. Sosialisasi dan penerapan perilaku hidup sehat dan peningkatan pelayanan prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		11. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dokter dan paramedis	Terpenuhinya kebutuhan tenaga dokter umum, spesialis, dan paramedis
		12. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana kesehatan
		13. Pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya	Berkurangnya jumlah kasus peredaran dan penggunaan obat serta kasus keracunan pangan
10. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk kurang dari 2% per tahun	15. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	14. Memfasilitasi Penyuluhan program KB	Meningkatnya jumlah peserta KB lestari dan membaiknya kualitas keluarga
		15. Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya pelayanan penduduk dan Catatan Sipil bagi masyarakat
11. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	16. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pembangunan	16. Pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan gizi masyarakat	Tingkat partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi meningkat
		17. Pemberdayaan perempuan dalam bidang aparatur, politik, hukum, ekonomi, dan HAM	Meningkatnya kesadaran perempuan dalam bidang aparatur, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan HAM
		18. Pemantapan kelembagaan perempuan	Terbentuknya organisasi yang mampu menyelurkan aspirasi perempuan

MISI EMPAT: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
12. Terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia	17. Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan agama	19. Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan agama	Terpenuhinya kebutuhan minimal sarana dan prasarana
		20. Memfasilitasi penambahan tenaga guru pendidikan agama	Terpenuhinya tenaga guru agama
		21. Memfasilitasi pengembangan/perbaikan sistem pendidikan agama	Tesusunnya sistem pendidikan agama sesuai kebutuhan
	18. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan agama	22. Memfasilitasi kuantitas dan kualitas guru agama	Meningkatnya kuantitas dan kualitas guru agama
	19. Peningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama	23. Memfasilitasi penyelenggaraan ibadah Haji di daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji
		24. Melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaan dan MTQ	Terlaksananya peringatan hari-hari besar keagamaan dan MTQ
		25. Penambahan tenaga penyuluh agama dan mubaligh	Tersedianya tenaga penyuluh agama dan mubaligh sesuai kebutuhan
		26. Sosialisasi keluarga sakinah, UU Perkawinan No. 10 tahun 1974 dan UU Zakat tahun 1999	Menurunnya angka perceraian dan meningkatnya kesadaran membayar zakat
	20. Peningkatan peran lembaga peradilan agama	27. Memfasilitasi penyuluhan hukum-hukum agama bagi masyarakat	Terlaksananya penyuluhan hukum-hukum agama

MISI LIMA: Melaksanakan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
4. Termanfaatkannya sumberdaya alam secara optimal dan berkesinambungan	4. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	13. Inventarisasi potensi sumberdaya hutan, pesisir dan kelautan serta bahan tambang	Tersusunnya database sumberdaya hutan, pesisir dan kelautan, dan bahan tambang
		14. Pengembangan pengelolaan potensi sumberdaya hutan, pesisir dan kelautan serta bahan tambang	Meningkatnya pengelolaan potensi sumberdaya alam
		15. Pengelolaan sumberdaya hutan, pesisir dan kelautan tambang yang berbasis kemasyarakatan	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam
		16. Penyuluhan dan pembinaan pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan	Meningkatnya kesadaran aparat, masyarakat, dan pengusaha tentang lingkungan hidup
		17. Penyusunan neraca sumberdaya alam (NSDA)	Tersusunnya NSDA
5. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkesinambungan	5. Pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan	18. Pengendalian permasalahan lingkungan hidup	Terinventarisasinya permasalahan lingkungan hidup dan tindak lanjutnya
		19. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Kota dan Kawasan	Tersedianya dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kawasan serta pendaftarannya
		20. Penataan Wilayah Kota Liwadan Krui	Berkembangnya Kota Liwa sebagai ibukota Kabupaten dan Kota Krui sebagai Kota Perdagangan dan tujuan wisata

		21. Pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Tersedianya model pengelolaan lingkungan hidup
--	--	---	--

MISI LIMA: Lanjutan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
6. Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	6. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	22. Pendidikan dan pelatihan serta pembentukan lembaga pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan lembaga adat tentang lingkungan hidup
		23. Pembentukan kelompok dan forum pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	Terbentuknya kelompok dan forum pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
		24. Rancang bangun teknologi tepat guna pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Diperolehnya teknologi tepat guna pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

MISI ENAM: Meningkatkan Keberdayaan Lembaga Adat dalam Pembangunan

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
2. Terwujudnya lembaga adat yang kuat dan berperan aktif dalam pembangunan	1. Pemberdayaan lembaga adat dalam proses pembangunan	1. Pembinaan dan pengembangan lembaga adat	Meningkatnya peran lembaga adat dalam pembangunan

MISI TUJUH: Mengembangkan Kepariwisata yang Berbasis Sumberdaya Alam dan Budaya

SASARAN	STRATEGI KEBIJAKAN	<i>PROGRAM PEMBANGUNAN</i>	INDIKATOR KINERJA
2. Berkembangnya kepariwisataan berbasis sumberdaya alam dan budaya daerah	4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya daerah sebagai objek wisata	8. Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata	Tersedianya perencanaan tapak kawasan wisata
		9. Penyuluhan sadar wisata baik kepada pihak pemerintah terutama sektor terkait maupun kepada dunia usaha dan masyarakat	Terciptanya suasana yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan
		10. Memfasilitasi penyediaan infrastruktur bagi pengembangan pariwisata	Meningkatkansarana dan prasarana kepariwisataan
	5. Pembinaan seni budaya daerah	11. Pembinaan seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah	Semakin tumbuh dan berkembangnya seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah
		12. Memfasilitasi peningkatan sarana dan fasilitas pengembangan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah	Tersedianya sarana dan fasilitas pengembangan budaya
	6. Promosi kepariwisataan	13. Peningkatan sarana promosi	Tersedianya sarana promosi baik cetak maupun visual yang memadai
		14. Pengiriman duta wisata dalam event pariwisata	Semakin dikenalnya budaya daerah pada event-event pariwisata